

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
(Studi Kasus BKAD Kabupaten Boalemo)**

Oleh

YULINGSI LUKMAN

E11.17.108

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
(Studi Kasus BKAD Kabupaten Boalemo)**

Oleh

YULINGSI LUKMAN

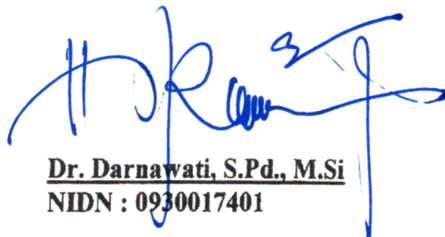
E11.17.108

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal 16 Maret 2021**

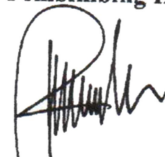
Gorontalo, 16 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
NIDN : 0930017401

Pembimbing II



Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak
NIDN : 00992919201

HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
(Studi Kasus BKAD Kabupaten Boalemo)

Oleh

YULINGSI LUKMAN

E11.17.108

Telah memenuhi dan dipertahankan pada komisi ujian akhir

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2021

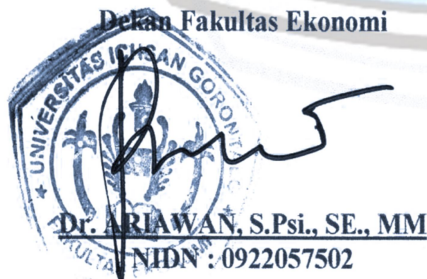
Komisi Penguji :

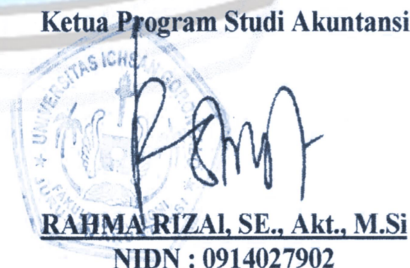
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Reyther Biki, SE., M.Si | : |
| 2. Nur Lazimatul H. S, S.Akun., M.Ak | : |
| 3. Rahma Rizal, SE., Akt., M.Si | : |
| 4. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si | : |
| 5. Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak | : |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN : 0922057502


RAHMA RIZAL, SE., Akt., M.Si
NIDN : 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan

Yulingsi Lukman
NIM. E1117108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Mujadilah : 11)

“Kalau setiap cerita hidup kita selalu indah, hati ini tak pernah kenal dekat dengan sabar dan ikhlas. Kalau setiap harapan kita selalu berjalan sesuai rencana, kita tidak pernah belajar bahwa kecewa itu menguatkan”

-Nadira Zaid-

“Jangan jadikan dirimu sebagai beban orang tua tapi, jadikan dirimu sebagai harapan mereka untuk bahagia teruslah berusaha mengukir senyuman indah di wajah mereka. Karena kesuksesan seorang anak tak luput dari do'a kedua orang tua”.

-Yulingsi-

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai Dharma Baktiku. Skripsi ini kupersembahkan kepada ke dua orang tuaku tercinta Papa (Ram Lukman) dan Mama (Lin Munggea) yang telah mengasuh, mendidik, menasehati dengan penuh harapan dan do'a dalam menuntun jalan hidupku. Buat kedua saudaraku (Yuningsi Lukman dan Aurel Farisya) yang telah bersedia menjadi saudara terhebat dan terbaik untukku. Buat sahabat terbaikku sekaligus teman hatiku (Agung Mootalu) yang selalu bersedia menemaniku dengan sabar dan penuh senyuman. Semoga Allah swt dapat melimpahkan karunia dan rahmat, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat kepada mereka. Aamiin

Wujud terimakasihku kepada seluruh dosen Universitas Ichsan Gorontalo khususnya dosen fakultas ekonomi paling special buat seluruh Dosen Pengajar yang

telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran studi di Program Strata-1 Akuntansi. Dan juga buat seluruh staf administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.

Banyak terimakasih juga buat rekan kerja BNNK Boalemo yang selalu mendukung dan selalu mnyemangati disaat penyusunan skripsi ini, terimakasih juga buat pegawai BKAD Kabupaten Boalemo, atas kesediannya sebagai responden dalam penulisan Skripsi ini.

Terimakasih buat Guru-guruku di SDN 02 Tilamuta, MTs. Negeri 1 Boalemo, SMK Negeri 1 Boalemo yang menjadi tempat menimba ilmu sebelumnya.

Buat teman - temanku seangkatan tahun 2017: Wilan Makore, ibu Dedty Melindawaty, Risna Badaru, Sarlin Hadi, Ciyandriawan, Nurayin Piu, Hasna Melu, Sabri Isa dan Zulkifli Arif.

ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENEMUKAN KEDEWASAAN DAN MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

ABSTRAK

YULINGSI LUKMAN. E1117108. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan dan parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Metode penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Penetapan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu laporan realisasi APBD per triwulan I-IV dengan dimensi waktu 5 tahun. Sampel dari penelitian ini adalah berupa laporan realisasi APBD Daerah Kabupaten Boalemo dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Selanjutnya secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo; dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo; dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, Kemandirian Pemerintah Daerah

ABSTRACT

YULINGSI LUKMAN. E1117108. THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, GENERAL ALLOCATION BUDGET, AND SPECIFIC ALLOCATION BUDGET ON THE SELF-SUFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT OF BOALEMO

The research aims at finding and analyzing the simultaneous and partial effect of local government revenue, general allocation budget, and specific allocation budget on the self-sufficiency of the local government of Boalemo. It applies a quantitative approach in which the research has a descriptive and verifying method and be analyzed with multiple linear regression. The samples are determined with purposive sampling which is the realization report of the Local Government Budget during the I-IV three-month period within a five-year time. The sample of the research is the realization report of the Boalemo Local Government Budget. Then it is found that the local government revenue, general allocation budget, and specific allocation budget partially and simultaneously give positive and significant effect to the self-sufficiency of the local government of Boalemo; the general allocation budget does not significantly affect the self-sufficiency of the Local Government of Boalemo, and the specific allocation budget gives a significant and negative effect to the self-sufficiency of the Local Government of Boalemo.

Keywords: Local Government Revenue, General Allocation Budget, Specific Allocation Budget, the Self-Sufficiency of the Local Government

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat, segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, serta hidayah yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada : Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., C.Sr, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Hi. Abdul Gaffar La Tjoke, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi., MM, Ibu Rahma Rizal SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Bapak Parmin Ishak S.Akun., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini, bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis

dalam mengerjakan usulan penelitian ini, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini dan semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini, teman-teman seperjuangan akuntansi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .	
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Teori Signaling (<i>Signalling Theory</i>)	9
2.1.2 Kemandirian Pemerintah Daerah	10
2.1.3Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	25
2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)	31

2.1.6 Penelitian Terdahulu	35
2.2 Kerangka Pemikiran	36
2.3 Hipotesis	37
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian	39
3.2 Metode Penelitian	39
3.2.1 Metode Yang Digunakan	39
3.3 Operasionalisasi Variabel	39
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
3.4.1 Populasi	41
3.4.2 Sampel	41
3.5 Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data	42
3.5.1 Sumber Data	42
3.5.2 Cara Pengumpulan Data	42
3.6 Prosedur Pengujian dan Instrumen Penelitian	42
3.6.1 Analisis Instrumen Penelitian	42
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.7 Rancangan Uji Hipotesis	44
3.7.1 Model/Gambar	44
3.7.2 Langkah-Langkah Pengujian Hipotesis	45
3.7.3 Sistem Pengelolaan Data Dengan Komputer	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor BKAD Kabupaten Boalemo.....	49
4.1.2 Visi Dan Misi BKAD Kabupaten Boalemo	51
4.1.3 Tugas BKAD Kabupaten Boalemo	51
4.1.4 Struktur BKAD Kabupaten Boalemo	55
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	56
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis	59

4.3 Hasil Pembahasan Penelitian	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3.1 Struktur Regresi Berganda	44
Gambar 4.1 Struktur BKAD Kabupaten Boalemo	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	57
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi APBD Kab. Boalemo	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Operasional Variabel X	40
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y	40
Tabel 4.1 Kepala Badan BKAD Kabupate Boalemo	50
Tabel 4.2 Deskriptif Stastik	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.4 Model Persamaan Regresi	60
Tabel 4.5 Hasil Uji R^2	61
Tabel 4.6 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Output SPSS	74
Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Lemlit	84
Lampiran III : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian	85
Lampiran IV : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	86
Lampiran V : Presentase Hasil Turnitin	87
Lampiran VI : Curriculum Vitae	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom dalam mengendalikan serta mengatur kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan aspirasi warga sesuai perundang-undangan, permasalahan kerangka otonomi daerah yang membahas pembagian ataupun perimbangan pusat serta wilayah. Perimbangan keuangan antara pusat serta wilayah sangat berarti serta wajib mencermati keadilan politik serta keadilan ekonomi. Perihal tersebut sesuai dengan syarat yang lazim dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang setelah itu diperbaiki dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda serta UU No. 25 Tahun 1999 yang setelah itu diperbaiki dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah.

Penyelenggaraan otonomi daerah bukan berfokus pada pendanaan dari pusat dalam wujud dana perimbangan saja. Tepatnya, wilayah biasa mandiri untuk membenahi rumah tangganya sendiri seperti kemandirian keuangan daerah, menggunakan, mendayagunakan, serta mengolah kemampuan yang terdapat di daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada warga serta pembangunan daerah.

Kemandirian daerah ialah kriteria untuk memandang sukses ataupun tidak suatu kebijakan pemerintah ialah indepeden wilayah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Kemandirian daerah bisa dilihat sebagai tingkatan bergantung pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam melakukan pembentukan, mengingat penerapan program pembentukan wilayah diberbagai bidang

memerlukan biaya/investasi yang cukup besar. Daerah yang sanggup merendahkan tingkatan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat bisa disebut daerah yang mandiri. Kemandirian daerah membuktikan keahlian pemerintah daerah dalam menanggung sendiri aktivitas pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada warga yang sudah membayar pajak serta retribusi selaku sumber pemasukan yang dibutuhkan wilayah.

Bujet penyelenggaraan pemerintah bersumber pada asas desentralisasi dicoba atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta layanan terhadap warga, wilayah diberi hak buat memungut pajak / retribusi serta mengelola SDA. Sumber dana untuk wilayah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pasal 157 terdapat PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK DBH) serta Pinjaman Wilayah. 3 sumber awal segera ditata oleh Pemerintah Wilayah lewat APBD, sebaliknya lainnya ditata oleh Pemerintah Pusat lewat kerjasama dengan pemerintah wilayah. Halim (2009).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang didapat berdasarkan perda sesuai perundang-undangan. DBH adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus yakni dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Di era desentralisasi, pemerintah pusat membagikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat dipakai untuk memajukan pembangunan daerah. Dana transfer pusat berfungsi sebagai perimbangan fiskal antar daerah dan mendorong pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum adalah dana berbentuk hibah baik pengelolaan dan penggunaannya yang diserahkan pada pemerintah daerah. Melalui transfer pusat seperti DAU diharapkan daerah lebih siap mengimplementasikan otonomi daerah. Selain itu, diharapkan daerah tersebut dapat mengalokasikan sumber-sumber pendanaan tersebut ke sektor-sektor yang berpotensi dapat mendukung peningkatan investasi daerah dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Begitu pula untuk dana perimbangan lainnya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dananya juga dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan khusus yang diprioritaskan negara. Pemberian DAK didasarkan pada bidang-bidang yang telah menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

Fakta menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengawasi rumah tangga daerah, yang menunjukkan bahwa daerah lebih bergantung pada dana alokasi umum (DAU) daripada pendapatan daerah yang membiayai belanja daerah. Dibandingkan dengan PAD, peran utama pembayaran transfer dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah ternyata tidak memberikan arahan yang baik kepada pemerintah atas arus transfer itu sendiri. Rizky dan Suryo (2009). Hal ini diperjelas dengan hasil riset

yang sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil riset menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan negatif, kemandirian daerah akan menurun apabila dana alokasi umum bertambah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung mengabaikan peningkatan pendapatan pemerintah itu sendiri karena terlalu memperkuat penerimaan DAU dengan jumlah yang sangat tinggi.

Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa ketergantungannya terhadap pemerintah pusat masih sangat menonjol karena sejauh ini perolehan daerahnya masih mengharapkan dana transfer dari pusat sebagai sumber terbesar untuk pendapatan daerahnya. Bisa dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi APBD Kab. Boalemo T.A 2015-2019

	Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
PAD	2015	4,457,367,863	17,274,601,482	22,746,545,828	43,432,090,348
	2016	4,537,516,920	21,684,661,546	31,706,036,886	48,794,270,892
	2017	14,467,237,645	23,667,468,251	41,801,077,823	71,687,164,839
	2018	12,308,978,152	21,633,176,521	34,308,407,166	56,019,131,871
	2019	28,143,723,722	37,964,601,919	52,704,079,571	70,712,830,833
DAU	2015	135,316,116,000	236,803,203,000	338,290,290,000	405,948,366,000
	2016	460,627,546,000	460,627,546,000	392,748,146,635	472,959,633,000
	2017	115,615,476,460	273,608,497,110	379,648,071,360	462,433,742,273
	2018	151,913,727,200	267,139,858,500	383,599,886,300	461,114,882,414
	2019	157,302,932,600	276,653,863,100	397,401,185,500	476,422,586,431
DAK	2015	25,057,083,000	49,366,313,500	97,103,581,000	174,949,070,000
	2016	259,806,709,000	259,806,709,000	115,291,376,000	174,931,807,112
	2017	10,911,064,000	59,966,995,902	118,759,991,902	211,831,753,187
	2018	22,025,858,241	69,088,343,241	158,443,195,691	209,589,456,124
	2019	17,586,347,849	45,731,900,514	105,358,598,530	184,065,294,812

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PAD dari tahun 2015-2019 setiap triwulannya selalu mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2018 di triwulan ke 4 PAD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Sementara untuk DAU dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 meskipun di tahun 2016 untuk triwulan 1 dan 2 nilainya menunjukkan angka yang sama. Selain itu DAU pada triwulan 4 dari tahun 2015-2019 cenderung berfluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian untuk DAK selama tahun 2015-2019 tiap triwulan cenderung mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2016 di triwulan 1 dan 2 memiliki angka yang sama. Sedangkan pada triwulan ke 4 setiap tahun selalu mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015-2019 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan tiap tahunnya meski di tahun 2018 PAD mengalami sedikit penurunan sementara di tahun 2018-2019 DAU tetap bertahan direalisasi anggaran yang sama, untuk DAK sendiri cenderung memiliki pola perkembangan yang lebih fluktuatif atau mengalami pola meningkat dan menurun setiap tahunnya. Kenaikan transfer pemda menunjukan bahwa masih kurangnya kemandirian suatu daerah, faktanya dapat dilihat pada tabel diatas meskipun jumlah PAD setiap tahun mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kontribusunya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah transfer pusat, meskipun jumlah penerimaan asli daerah saja tidak cukup untuk menunjukan tingkat kemandirian daerah. Hal ini menunjukan bahwa

kecanduan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo terhadap penghasilan pusat relatif besar.

Menurut RGG berdasarkan hasil wawancara bahwa dana transfer merupakan bagian dari Belanja Negara untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, daerah yang mengalami kenaikan alokasi dana transfer baik dalam segi jumlah dan presentase tentunya akan merasa senang karena akan memiliki anggaran lebih banyak untuk dapat dibelanjakan kepada pelayanan masyarakat. Namun sebaliknya, ada daerah yang merasa ketidakadilan dalam penentuan alokasi dana tersebut karena jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga dana transfer sangat berpengaruh pada tingkat kemandirian pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dari beberapa sumber yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- 2) Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Boalemo.

- 3) Seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- 4) Seberapa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakan riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Boalemo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- 2) Untuk mengukur seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- 3) Untuk mengukur seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Boalemo
- 4) Untuk mengukur seberapa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Peneliti

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian terdahulu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan sumber pengetahuan serta

bahan keputusan atau sejenisnya sebagai dasar informasi bagi pihak yang menggunakannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian diharapkan akan berguna sebagai tambahan informasi dan sebagai masukan dalam mengevaluasi mekanisme pemerintah dalam mengalokasikan dana transfer, PAD, DAU dan DAK terhadap kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

2) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap peneliti selanjutnya terutama mengenai pengalokasian dana transfer, PAD, DAU dan DAK terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Signalling Theory*

Teori sinyal terkait dengan sektor publik, yang bermakna bahwa masyarakat bertindak sebagai wali amanat sekaligus pemilik serta konsumen. Pemda dan DPRD menjalankan posisi dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat atau dengan sebutan kata sebagai pengelola. Dalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah (pemda) berperan sebagai investor dan publik merupakan prinsip yang memberdayakan DPRD untuk mengawasi kinerja pemda. *Accountability* adalah hasil sistematis dari hubungan antara agen dan prinsipal. Se jauh ini menyangkut teori keagenan, dapat dikatakan bahwa pengawasan anggaran eksekutif oleh lembaga legislatif merupakan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi atau mengurangi ketidakpastian. Pengawasan diperlukan untuk menimbang dan memprediksi tujuan dan peluang kegiatan *intervention*. Mayasari (2012).

Hubungan antara teori sinyal dengan penelitian ini adalah bahwa dalam teori sinyal dijelaskan pentingnya penyediaan informasi yang harus diberikan kepada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pemerintah itu sendiri, sedangkan pihak eksternal adalah DPRD, Bawasda dan masyarakat. Salah satu jenis data yang disampaikan oleh otoritas publik yang dapat menjadi penanda pertemuan luar, khususnya individu yang berinvestasi, adalah laporan tahunan. Laporan tahunan harus berisi data yang signifikan dan mengungkap data

yang dianggap penting untuk diketahui oleh klien laporan, baik di dalam maupun di luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya membutuhkan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah. Sehingga pengguna berita keuangan dapat mengukur tingkat kinerja kemandirian pemda Kabupaten Boalemo.

2.1.2 Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan telah menggunakan bea dan *retribution* sebagai pendapatan daerah untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lain seperti pembayaran transfer induk (DAU, DAK, DBH) atau pinjaman lain, skala PAD menunjukkan kemandirian daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap, daerah diberikan Beberapa desentralisasi kekuatan pemerintah pusat. Jadi untuk lebih dalam Penerapan otoritas diberikan berjalan sesuai dengan itu Untuk memberikan otonomi daerah, diberikan kekuasaan daerah supaya diperoleh sumber pembiayaan sesuai potensi yang ada dengan mengacu pada hukum dan peraturan saat ini. Tentunya sama hal seperti tafsir dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, yang mengatur bahwa daerah berhak memperoleh sumber pendanaan, antara lain: menentukan sumber pendanaan yang dapat disediakan pemerintah berdasarkan urusan pemerintahan yang diajukan; hak untuk memperoleh dan menggunakan bea dan pungutan daerah, dan hak berbagi hasil sumber daya nasional dan dana perimbangan lainnya yang berada di daerah; mengolah kekayaan daerah dan memperoleh hak atas sumber pendapatan hukum

lainnya dan sumber pembiayaan lain. Adapun uraian indikator dari pada tingkat kemandirian pemerintah daerah yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib bagi daerah yang terutang oleh orang atau badan, dan diberlakukan sesuai dengan undang-undang tanpa kompensasi langsung sesuai dengan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah. Bea atau sumbangan harus yang diserahkan oleh warga setempat kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Seperti termasuk membangun jalan, jembatan, membuka lapangan kerja baru, dan pembangunan lainnya dan kepentingan pemerintah. Selain untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pajak daerah yang mengacu pada pelunasan biaya jasa atau izin tertentu yang disediakan dan / atau diserahkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau perusahaan. Beraneka ragam yang beranggapan bahwa pungutan wilayah sama halnya seperti pajak daerah. Penjelasan ini tak sepenuhnya buruk, sebab keduanya mempunyai kesamaan dan variasi. Keduanya memiliki sumber penting penghasilan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan. Jika masyarakat patuh

membayar keduanya maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Adapun jenis-jenis retribusi daerah beserta tarifnya adalah :

1) Retribusi Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pajak pelayanan atas bantuan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan jadi kepentingan umum, yang dapat dirasakan oleh perseorangan. Retribusi Jasa Umum dibagi menjadi 15 bagian, antara lain :

- a. Biaya Pelayanan Kesehatan dipungutan untuk biaya layanan kesehatan di Puskesmas, gedung Pengobatan, rumah sakit daerah, serta fasilitas kesehatan yang sama dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Retribusi jasa Sampahan/Kebersihan, digunakan dalam mengumpulkan sampah/jasa kejernihan yang dipakai oleh pemda, termasuk pengumpulan dan pembangunan/penghilangan sampah rumah tangga dan perdagangan. Belum terdapat jasa kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan bakti sosial.
- c. Retribusi penguburan jenazah atau abu untuk membayar jasa pemakaman serta biaya jenazah, terdapat penggalian, penguburan, pembakaran/kremasi tempat yang dikelola oleh daerah tersebut.
- d. Biaya jasa parkir di pinggir jalan umum disediakan oleh area alokasi jasa parkir.
- e. Retribusi jasa pasar digunakan untuk memungut biaya penggunaan fasilitas pasar tradisional, formulir ini disediakan pengadilan dan bilik

yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali untuk BUMN, BUMD dan fasilitas pasar yang dikelola swasta.

- f. Retribusi uji kendaraan bermotor akan dikenakan pada layanan pengujian kendaraan bermotor regional sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- g. Membayar penukaran bayaran cetak peta, digunakan dalam membayar penggunaan peta yang diproduksi oleh pemerintah daerah.
- h. Retribusi untuk penyediaan dan/atau pembongkaran toilet untuk layanan pengumpulan toilet.
- i. Retribusi pengolahan limbah cair dikenakan pada layanan pengolahan air limbah domestik, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi jasa kalibrasi/kalibrasi ulang, yang digunakan untuk membayar jasa ukur, alat penimbangan dan pengujian peralatan serta pengujian barang kemasan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Retribusi untuk layanan pendidikan digunakan untuk memungut pajak atas layanan pengajaran dan pelatihan teknis yang disediakan oleh pemda.
- l. Retribusi penguasaan menara telekomunikasi digunakan dalam memungut tarif pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.
- m. Pungutan pengendalian lalu lintas dipungut untuk penggunaan jalan, koridor dan area tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pajak atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersial, antara lain jasa yang menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan / atau jasa pemerintah daerah yang belum dapat sepenuhnya disediakan oleh swasta (Sumber: Pajak.com). Retribusi Jasa Usaha dibagi menjadi 11 bagian:

- a. Pemberian imbalan atas penggunaan aset daerah, penggunaan aset wilayah seperti penggunaan tanah dan bangunan, ruang berkumpul, serta kendaraan/alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan lahan yang tidak akan merubah makna lahan, seperti pemasangan kabel/tiang listrik, dll.
- b. Retribusi pasar grosir dan / atau toko merupakan meminta biaya fasilitas pasar induk untuk berbagai komoditas yang dialihdayakan dan fasilitas pasar /perbelanjaan yang disediakan oleh berbagai daerah.
- c. Permintaan lokasi penjualan digunakan untuk mengumpulkan pungutan di tujuan penjualan yang secara unik diberikan oleh pemerintah lingkungan untuk penjualan ikan, hewan, barang-barang pedesaan dan kayu.
- d. Tugas terminal, digunakan untuk mengumpulkan administrasi keberangkatan untuk kendaraan wisatawan dan angkutan umum, tempat bisnis dan kantor yang berbeda dalam iklim terminal yang diklaim / diawasi oleh daerah, dimiliki / diawasi oleh otoritas publik, BUMN, BUMD dan kawasan pribadi. kecuali.

- e. Ruang parkir dikenakan pajak atas penggunaan ruang parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola secara eksklusif oleh kawasan, kecuali ruang parkir yang disediakan / dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- f. Selain akomodasi / hotel / villa yang dimiliki / dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta, distribusi pendapatan jasa akomodasi / hotel/ villa yang dimiliki dan / atau dikelola oleh daerah.
- g. Penilaian dan tugas yang dikumpulkan oleh RPH digunakan untuk menawarkan jenis bantuan untuk rumah potong hewan yang dimiliki dan / atau diawasi oleh kabupaten, termasuk manfaat investigasi kesejahteraan makhluk saat pemotongan.
- h. Layanan pelabuhan adalah biaya yang dikenakan atas layanan pelabuhan yang didirikan, atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi tempat hiburan dan pengaturan olahraga digunakan untuk mengumpulkan biaya atas penggunaan pengalihan, industri perjalanan, dan tempat olahraga yang diklaim dan diawasi oleh wilayah tersebut
- j. Tarif penyaluran air merupakan biaya jasa penggunaan kendaraan air milik / wilayah pengelola untuk melintasi orang / benda.
- k. Retribusi penjualan produk usaha daerah, digunakan untuk memungut pajak penjualan atas produk usaha pemerintah daerah, kecuali penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak izin tertentu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas layanan berlisensi tertentu dari individu atau badan yang bertujuan untuk mengawasi dan memanfaatkan penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, komoditas, fasilitas, atau sarana tertentu untuk melindungi kepentingan umum. Dan melindungi lingkungan. (Sumber: Pajak.com). Retribusi Perizinan terdiri dari 6 bagian sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan untuk meminta pungutan izin mendirikan bangunan.
- b. Retribusi atas pemasaran arak biaya layanan lisensi untuk izin penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu
- c. Alokasi izin gangguan digunakan untuk memungut pajak pelayanan atas tempat usaha / izin kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian / gangguan di wilayah tertentu, tidak termasuk tempat / kegiatan usaha yang ditentukan di wilayah tersebut.
- d. Alokasi izin trayek, digunakan untuk memungut pajak untuk memberikan persetujuan bisnis dalam menyediakan layanan angkutan penumpang umum di satu atau lebih trayek tertentu.
- e. Kumpulkan persetujuan usaha perikanan untuk memungut pajak dalam menerbitkan persetujuan untuk agenda komersial penangkapan ikan dan budidaya ikan.

- f. Memperpanjang retribusi izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) karena Perpanjangan Pajak IMTA diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (Sumber: Pajak.com)

3. Sumber Daya Nasional

Menurut UU No. 23 Tahun 2019 Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Komponen pembantu merupakan sumber daya nasional yang telah dipakai untuk meningkatkan kekuatan dan fungsi komponen utama dan komponen cadangan.

4. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana (otonom) yang diperoleh dari pendapatan APBN yang ditujukan untuk setiap daerah untuk menangani masalah-masalah lokal yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Besaran cadangan ekuilibrium ditentukan oleh setiap tahun pengeluaran dalam APBN. Aset ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, khususnya cadangan alokasi luas, aset angkutan luar biasa, dan aset pembagian manfaat. Porsi habis-habisan aset, yang dikutip dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jasa Rekening Republik Indonesia, merupakan cadangan yang dihimpun dari APBN dengan maksud penyebarluasan batasan moneter antardaerah untuk mengatasi masalah-masalah lokal. Dalam sistem pelaksanaan desentralisasi. Cadangan penyaluran luar biasa adalah cadangan yang dialokasikan untuk daerah tertentu dari pendapatan APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan keuangan yang tidak lazim yang bersifat provinsi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aset pembagian manfaat adalah cadangan yang ditentukan dari

pendapatan APBN yang dibagikan ke kabupaten yang bergantung pada angka tarif untuk memberikan aset untuk kebutuhan teritorial dalam rangka mewujudkan desentralisasi. (Sumber: Pajak.com).

5. Kekayaan Daerah

Dengan judul “Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah” sebagai haknya, mengenakan biaya atas penggunaan kekayaan daerah. Objek retribusi atas penggunaan aset daerah adalah penggunaan aset daerah. Yang tidak dibatasi dalam pengertian penggunaan aset tanah adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi tanah, yaitu pemasangan kabel atau tiang telepon atau penanaman / peregangan kabel / kabel telepon di samping jalan umum. Objek pungutan penggunaan kekayaan daerah adalah swasta atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. Pungutan wajib atas penggunaan kekayaan daerah adalah orang perseorangan atau badan yang wajib memungut pajak atas penggunaan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memungut atau memotong pajak atas penggunaan kekayaan daerah. Tingkat pemanfaatan jasa aset daerah diukur menurut jenis kekayaan, lama pemanfaatan, nama yang digunakan, nilai strategis / ekonomis yang digunakan, dan jumlah / luas kekayaan daerah. Prinsip dan tujuan penetapan struktur dan biaya retribusi aset daerah adalah biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya pemeliharaan / perawatan, biaya penyusutan, biaya operasi dan biaya pengembangan. (Sumber: Keuangan.kendalkab.go.id).

Mengenai otonomi wilayah, fungsi pokok pemda adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana

yang memenuhi keperluan masyarakat, namun daerah tidak semua memiliki kapasitas yang pas-pasan dalam menyediakan dana bagi sarana dan prasarana tersebut. Sebab itulah dalam rangka membantu daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan melalui Dana Alokasi Khusus. Seperti yang tertera dalam tafsir hukum. Resolusi Nomor 33 Tahun 2004, DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu berdasarkan prioritas nasional, kegiatan tersebut merupakan urusan daerah, terutama untuk mendanai kepentingan sarana dan prasarana pelayanan publik dasar yang tidak memenuhi standar tertentu, atau untuk mendorong Mempercepat pembangunan daerah. Dapat disimpulkan bahwa DAK digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang merupakan investasi alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berikut perhitungan Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tahapan didapat oleh daerah dan dikumpulkan sesuai pedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD adalah sumber pendapatan lokal yang didapat dari sumber penerimaan di daerah. Pemanfaatan kemajuan daerah

membutuhkan banyak sekali dana yang cukup, untuk hal ini daerah tidak dapat hanya bergantung pada keseimbangan aset dari penguasa induk, sebab itu daerah harus memiliki opsi dalam memanfaatkan potensi teritorial untuk dijadikan standar pembiayaan konsumsi dan belanja perbaikan lokal untuk membangun pendapatan pada saat pembelanjaan lokal. Dengan kehadiran PAD, petunjuk penting dapat digunakan untuk mengevaluasi otonomi pemerintah terdekat di bidang moneter. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) meliputi: pajak daerah adalah salah satu komponen PAD dan membuat komitmen besar untuk pendapatan PAD.

Penerimaan asli daerah adalah penerimaan bea yang meliputi pajak daerah, penerimaan bukan bea yang meliputi hasil kepemilikan perusahaan daerah, penerimaan investasi, dan akumulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Bastian (2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menentukan apa yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, caranya dengan melakukan penelitian, pembudidayaan dan pengelolaan sumber pendapatan tersebut secara tepat guna untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Elita (2007). Berikut adalah beberapa indikator pendapatan asli daerah :

1. Pajak Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada indikator tingkat kemandirian pemerintah bahwa bea daerah adalah sumbangan yang terutang ke daerah oleh swasta atau lembaga wajib yang secara hukum wajib tidak langsung dikompensasikan, tetapi

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran. UU nomor 28 tahun 2009.

2. Pos Penerimaan Non Pajak

Sumber pajak negara bukan pajak antara lain laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengolaan sumber daya alam, uang muka, barang dagangan yang disita, mencetak uang tunai atau hadiah. Berikut ini beberapa model:

- a. Jenis pendapatan untuk barang dagangan yang dikendalikan atau diklaim oleh otoritas publik. Barang dagangan yang dibatasi oleh negara kemudian disewakan ke pertemuan pribadi. Sewa tersebut kemudian dikenakan untuk penyimpanan negara sebagai mata air pembayaran publik.
- b. Organisasi yang menerapkan sindikasi moneter dan oligopoli. Sebagaimana dirujuk di atas, salah satu sumber penerimaan negara yang tidak dipungut biaya adalah dari keuntungan dari usaha milik negara. Upaya yang diklaim oleh negara biasanya bersifat monopoli dan sangat besar. Manfaat BUMN ini menjadi penerimaan negara yang hanya digunakan untuk mensubsidi negara itu sendiri.
- c. Aset yang terbengkalai dianggap sebagai warisan yang ditinggalkan, atau tidak ada yang menuntutnya. Untuk situasi ini, negara memiliki opsi untuk menyatakan bahwa jika tidak ada penerima yang akan memperoleh hak istimewanya dalam waktu yang ditentukan, maka properti tersebut akan berubah menjadi milik negara.

- d. Ganti rugi dikenakan dalam keperluan umum. Jika besaran dendanya sudah disepakati, dendanya berupa penyitaan atau pembayaran. Barang sitaan biasanya akan dilelang dan hasilnya akan ditransfer ke bendahara.
- e. Retribusi dan biaya semacamnya. Tol itu sendiri adalah pungutan yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Sebagaimana diindikasikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, yang dimaksud dengan objek pembayaran adalah penyelenggaraan atau keuntungan publik dan penyelenggaraan untuk kepentingan umum, penyelenggaraan usaha dan hibah tertentu. (Sumber: Pajak.com).

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masyarakat yang hidup dalam pandangan dunia Desa Simerpara dan landasan filosofis penguasaan sumber daya alam mencerminkan tatanan sosial seluruh suku Batak. 18 Sebagai bagian dari sub-marga Pakpak, konsep penguasaan sumber daya alam marga Manik terkait dengan penguasaan wilayahnya, sebagaimana tercermin dalam istilah-istilah berikut: ganop-ganop banua martano rura (setiap wilayah banua memiliki tanah dan air sebagai wilayahnya). Aturan ini berlaku untuk hutan dan sumber daya yang ada di dalam wilayah benua dikendalikan oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya, terlepas dari apakah sumber daya tersebut telah dikelola (hak guna) atau dibatasi pada klaim penguasaan wilayah di bawah hukum adat. Organisasi lokal Ganop-Ganop Banua Martano Rura mengemukakan bahwa pisang, hutan harus didukung oleh sumber daya air, kawasan hutan dan lahan penggembalaan. Kebutuhan bank, irigasi sawah, budidaya ikan dan kebutuhan hidup lainnya semuanya

membutuhkan air. Padang rumput semestinya terdapat di luar kawasan pemukiman, seperti di lereng bukit. Kawasan hutan diperlukan untuk menunjang kehidupan ekonomi penduduk, sebab sebagian besar penduduk hidup di lahan kering dan persawahan. Deforestasi untuk kegiatan pertanian biasanya dimulai dengan membuka lahan dan kemudian membiarkannya menjadi biru atau selanjutnya menanam tanaman pohon, seperti kopi atau karet. Masyarakat setempat mengetahui pembagian hutan atau kawasan hutan karena dilarang melakukan kegiatan pertanian, berburu atau mengumpulkan hasil hutan. Adanya tabu dan faktor kepercayaan melegitimasi keberadaan hutan terlarang. Apakah warga dapat menggunakan banua dan sumber daya di hutan pada dasarnya terkait dengan struktur sosial dan politik hutan. Secara umum, ada kepercayaan bahwa setiap anggota komunitas etnis Tukang roti berhak menggunakan pisang dan huta untuk menghidupi keluarganya dengan mengumpulkan, berburu, atau membersihkan lahan pertanian. Lahan pertanian yang telah dibuka menjadi area "kepemilikan" keluarga yang membuka lahan tersebut. Kawasan yang dikendalikan oleh keluarga deforestasi berubah status menjadi "hak milik pribadi". Masyarakat dari hutan dan komunitas banua lainnya dapat menggunakan "hak milik pribadi" setelah mendapat izin dari pemegang yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan setelah mengikuti prosedur adat, syarat dan ketentuan, dan transaksi yang dapat mengakibatkan pengalihan kepemilikan kepada orang lain dan masyarakat tidak dapat dilakukan. Dalam konsep Batak, kesatuan hidup lokal dan bentuk lingkungan dibagi menjadi Huta Menyerah dan Patagalan. Huta menyerah atau kemudian bekerja sebagai penyewa hutan. Huta

pagaran adalah kabin lain yang dibangun oleh penduduk tua dengan alasan bahwa hutan utama terlalu tebal dan aset umum yang dapat diakses berkurang. Pagar Hutan adalah satelit buatan dari hutan utama. Selain menggambarkan jejaring sosial antar penduduk, bentuk-bentuk solidaritas hidup yang berbasis penyerahan dan huta huta juga mempengaruhi tata kelola politik dan ekonomi hutan. Dalam konsep etnis Batak, Huta Pesera dan Huta Pagaran tidak mendeskripsikan hubungan sosial secara horizontal, tetapi merupakan ekspresi dari hirarki pemerintahan politik. Pelembagaan pengendalian dan pemanfaatan air yang dikonseptualisasikan oleh masyarakat Bei-Ba didasarkan dan memadukan prinsip-prinsip milik umum (*public property*) dan hak publik (*open access*). Di sisi lain, air kali dan seisinya dianggap sebagai sumber daya terbuka, yang tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang, tetapi dikuasai dan digunakan secara kolektif. Di sisi lain, karena sungai mengalir masuk dan melebihi wilayah hutan, warga setempat memutuskan air sungai yang melintasi wilayahnya menjadi milik umum. Oleh karena itu, di sepanjang sungai terdapat bagian-bagian tertentu yang termasuk dalam bagian yang sama dan terdapat area umum.

PAD mengasumsikan pekerjaan penting dalam perekonomian daerah. Lokal dengan tingkat perkembangan PAD positif pada umumnya akan memiliki gaji per kapita yang lebih baik. Harianto dan Adi (2007). Dalam hal ini PAD di suatu daerah berkembang, maka kekayaan yang dimiliki oleh badan publik juga akan bertambah. Perluasan ini akan menguntungkan otoritas publik karena cenderung digunakan untuk mengatasi masalah lokal. Berikut pengukuran PAD yaitu :

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan anggaran yang diperoleh dari penerimaan APBN. Maksud pengalokasiannya adalah untuk mendistribusikan kemampuan keuangan antar daerah secara merata dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga memberikan kebutuhan daerah menyediakan dana. Menurut Saragih (2003: 104), untuk wilayah dengan sumber daya alam yang relatif sedikit, DAU merupakan sumber pendapatan penting yang dapat menunjang operasional harian pemerintah dan sumber biaya bangunan. Motivasi DAU tidak hanya untuk membantu sumber pendapatan wilayah, tetapi juga untuk menyeimbangkan batasan keuangan pemerintah daerah.

DAU tujuannya untuk mengurangi ketimpangan kesanggupan keuangan antar daerah dengan menggunakan formula yang memperhatikan kebutuhan dan potensi. Yani, sehingga mampu menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah (2002: 142). DAU daerah bergantung pada besar kecilnya kesenjangan fiskal daerah, yaitu selisih antara permintaan daerah (permintaan keuangan) dan potensi daerah (kemampuan keuangan). Alokasi DAU untuk daerah dengan potensi fiskal lebih besar tetapi permintaan fiskal lebih sedikit akan menerima alokasi DAU yang relatif kecil. Di sisi lain, daerah dengan potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Oleh karena itu, jika DAU relatif besar maka akan mempengaruhi derajat

kemandirian pemerintah daerah. Dana penyaluran umum memiliki tiga indikator penting, yaitu:

1. Celah Fiskal

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, DAU suatu kabupaten ditetapkan berdasarkan porsi keuangan dan esensial. Lubang keuangan adalah bunga moneter, moneter provinsi. Informasi yang digunakan untuk memastikan sosialisasi penting mencakup: konsumsi untuk pegawai pemerintah teritorial (menghitung THR dan kompensasi non-Tukin / TPP ketigabelas) dan permintaan pelamar pegawai pemerintah provinsi (CPNSD). Informasi yang digunakan untuk menghitung persyaratan moneter meliputi: (CPNSD). Data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal antara lain:

- a. Total Belanja Rata-Rata
- b. Jumlah Penduduk,
- c. Luas Wilayah Darat,
- d. Luas Wilayah Laut,
- e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK),
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Sementara itu, data yang digunakan untuk perhitungan kapasitas fiskal terdiri dari

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dan
- c. DBH Pajak.

2. *Fiscal Need*

Kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal ini biasanya dibahas saat menghitung besarnya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (transfer hibah antar pemerintah). Di sini, selisih permintaan fiskal dikurangi kapasitas fiskal (atau celah fiskal) menjadi dasar untuk menentukan jumlah yang akan ditransfer dari pusat. Di Indonesia saat ini, jenis transfer tersebut adalah dana penyaluran umum, dan artikel ini akan membahasnya secara singkat. Setiap wilayah (sub-negara) harus menyediakan layanan publik minimum (penting) terhadap orang-orang yang berada di dalam perbatasannya, apakah mereka penduduk tetap atau pendatang. Banyak daerah yang menanggung banyak tanggung jawab keuangan, seperti daerah dengan jumlah penduduk kurang mampu yang banyak atau daerah dengan proporsi penduduk usia sekolah yang tinggi (usia 6-18 tahun). Kemudian, misalnya, wilayah dengan wilayah yang luas dan populasi yang terpencar-pencar harus menanggung pengeluaran per kapita yang tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Karena mahal biaya pelayanan publik atau perluasan cakupan rencana yang harus dilaksanakan di berbagai daerah, semua itu mencerminkan kebutuhan finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, pada dasarnya permintaan fiskal adalah permintaan (kebutuhan belanja) terhadap kekuatan daerah untuk menyediakan dana bagi seluruh pengeluaran guna menjalankan fungsi daerah dan memberikan pelayanan publik.

Memang tidak mudah menghitung atau mengukur kebutuhan finansial suatu daerah yang sebenarnya. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh data yang

tidak lengkap atau ketidakjelasan tentang fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah daerah. Secara garis besar, terdapat 2 metode yang dapat dipakai untuk mengukur kebutuhan fiskal suatu daerah. Metode pertama adalah memilah pengeluaran pemerintah daerah ke dalam kategori yang berbeda dalam Kertas Kerja No. 5 dan memperkirakan kebutuhan pemerintah terkait di setiap kategori. Tipikal merupakan : pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, kesejahteraan sosial, polisi dan perlindungan kebakaran, perlindungan lingkungan dan layanan lainnya. Tentunya pembagian ini seringkali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sesuai dengan yurisdiksi / fungsi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun yang sudah dijelaskan di atas adalah fungsi yang biasanya dikuasai di bidang ini.

2. Klasifikasi ini juga bergantung pada kebutuhan anggaran dan ketersediaan data masing-masing negara. Misalnya, transportasi dan telekomunikasi dapat digabungkan, polisi dan pemadam kebakaran dapat dipisahkan (atau polisi dapat dihapuskan karena tidak diizinkan oleh pemerintah daerah di Indonesia), dan pendidikan dapat dibagi menjadi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jika kebutuhan fiskal diukur untuk membentuk dana transfer perimbangan, banyak negara akan mempertimbangkan kebutuhan pengeluaran harian, yang juga termasuk biaya pemeliharaan proyek. Biaya proyek baru biasanya dikeluarkan, karena selain jumlahnya yang besar, sulit untuk menemukan indikator permintaannya. Selain itu, manfaatnya seringkali berjangka panjang, jadi jika biaya proyek sepenuhnya didanai oleh sumber pajak saat ini, ini akan bertentangan dengan "prinsip pendapatan" perpajakan. (Sumber: Ipem.org)

3. *Fiscal Capacity*

Kapasitas fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, dan sering kali diukur sebagai proporsi produk domestik bruto yang dihasilkan oleh penerimaan pajak. Secara keseluruhan, negara maju yang lebih kaya memiliki administrasi pajak yang lebih besar dan lebih kuat dan mengumpulkan lebih banyak uang melalui pendapatan pajak daripada negara berkembang yang lebih miskin. Dengan demikian, semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan pemerintah, semakin besar kapasitas fiskal. Namun, kapasitas fiskal diukur tidak hanya dengan tingkat penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan oleh suatu negara, tetapi oleh kemampuan administrasi perpajakan untuk menegakkan kebijakan perpajakan. *Besley and Persson* (2012) menyajikan daftar "fakta bergaya" yang menggambarkan evolusi dan pola kapasitas fiskal. Fakta-fakta ini adalah pola yang diidentifikasi dari analisis data cross-sectional dan time series di 73 negara sejak tahun 1800:

- a. Negara-negara kaya telah melakukan investasi berturut-turut dalam kapasitas fiskal mereka dari waktu ke waktu.
- b. Negara-negara kaya mengumpulkan bagian yang jauh lebih besar dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak daripada negara-negara miskin.
- c. Negara-negara kaya lebih bergantung pada pajak pendapatan dibandingkan dengan pajak perdagangan daripada negara-negara miskin
- d. Negara-negara dengan pajak tinggi lebih bergantung pada pajak pendapatan dibandingkan dengan pajak perdagangan daripada negara-negara dengan pajak rendah.

- e. Negara kaya mengumpulkan pendapatan pajak yang jauh lebih tinggi daripada negara miskin meskipun tarif undang-undang sebanding.

Kapasitas fiskal berubah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, tidak hanya dalam jumlah penerimaan pajak yang dapat diperoleh setiap negara bagian, tetapi juga cara perolehan pendapatan tersebut. Secara spesifik, berbagai jenis pajak dianggap lebih efisien secara ekonomi, dan karenanya lebih ideal, daripada yang lain. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada jenis pajak dan efisiensi ekonomi di halaman Pajak. Dengan demikian, kekuatan kapasitas fiskal suatu negara bukannya ditentukan oleh jumlah penerimaan yang diperoleh, tetapi juga dipengaruhi oleh efisiensi struktur perpajakannya. Misalnya, teori perpajakan optimal menyatakan bahwa struktur pajak yang ideal memaksimalkan efisiensi; Pajak yang tidak efisien termasuk pajak pendapatan perusahaan, tarif dan seigniorage, sedangkan pajak yang efisien termasuk pajak pendapatan dan pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, negara maju yang lebih kaya dan negara dengan kapasitas fiskal yang kuat cenderung bergantung pada jenis pajak yang efisien ini, sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk negara berkembang yang lebih miskin. (Sumber: en.wikipedia.org). Berikut pengukuran DAU yaitu :

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Seperti yang diindikasikan oleh Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah aset yang dialokasikan kepada daerah tertentu dari pendapatan APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat teritorial dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana yang menjadi kebutuhan publik dimuat dalam rencana kerja pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri mengusulkan latihan yang tidak biasa yang didukung oleh DAK dan membangunnya dalam upaya bersama dengan Menteri Rumah Tangga, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara untuk Rencana Kemajuan Publik sesuai dengan otoritas publik. rencana kerja. Menteri Teknologi menyajikan pengaturan acara khusus kepada Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membiayai urusan daerah dan prioritas nasional berdasarkan fungsi yang ditunjukkan oleh tugas-tugas pemerintahan di daerah tertentu, terutama untuk memenuhi kepentingan sarana dan prasarana pelayanan publik dasar. Acara spesial transfer DAK dari rekening kas biasa negara ke rekening kas daerah biasa melalui pembukuan Penerima DAK harus memenuhi syarat umum, syarat khusus dan syarat teknis di rekening tersebut. Yani (2002: 166). Berikut adalah tiga indikator dari dana alokasi khusus yaitu :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah instrumen langsung yang digunakan untuk melakukan siklus latihan kantor. Pedoman Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang

Normalisasi Kantor dan Kerangka Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 telah menjelaskan bahwa: Kantor kerja kantor adalah kantor yang secara langsung bekerja sebagai bantuan untuk mewujudkan pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan, termasuk: ruang kantor, perangkat keras kerja, dan kendaraan otoritas. Menurut pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa fasilitas kantor adalah benda bergerak atau fasilitas pelengkap berupa benda yang dapat langsung digunakan untuk memajukan tindakan kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, mesin-mesin kantor, peralatan, perlengkapan kantor dan lain sebagainya. (Sumber: <https://text-id.123dok.com/>)

2. Pelayanan Dasar Masyarakat

Sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Teritorial, pemerintah memberikan Pedoman Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Prinsip-Prinsip Bantuan Terkecil (*Least Assistance Principles*) menggantikan Pedoman Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Tata Tertib dan Penyelenggaraan Norma Bantuan Terkecil. Peraturan ini disingkat "Standar Pelayanan Minimal" atau SPM, yaitu pengaturan tentang jenis dan kualitas pelayanan dasar. Ini urusan pemerintahan yang wajib, setidaknya dimiliki oleh setiap warga negara. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah layanan umum yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam "Standar Pelayanan Minimal" adalah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah

(pemerintah provinsi dan daerah). Urusan wajib pemerintah terkait pelayanan dasar (jenis SPM selanjutnya) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial. (Sumber: <https://pemerintah.net/>)

3. Rekening Kas Umum Negara

Rekening negara sebagaimana diindikasikan oleh Rahayu (2010: 264) merupakan kewenangan atau komitmen dari pengekspresi yang harus dihargai dengan uang tunai, sebagaimana segala sesuatu berupa uang tunai atau barang dagangan yang dapat dimanfaatkan sebagai hak negara sehubungan dengan penggunaan hak dan komitmen tersebut. Dana negara diawasi dengan tepat, sesuai dengan pedoman hukum, cakap, praktis, menarik, lugas dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun mengenai penyelenggaraan Dana Negara akan dibingkai suatu Pelayanan yang akan menangani semua pendapatan atau penggunaan mulai dari negara yang disebut APBN hingga tingkat teritorial, tepatnya APBD.

Menurut Rahayu (2010: 14-18), di Indonesia sejarah pengelolaan keuangan pemerintah sudah ada dari jaman kerajaan hingga sekarang, setiap pemerintahan memiliki pengelola keuangan yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi dalam pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintah di sini mencakup semua milik pemerintah atau milik pemerintah. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat dalam bentuk upeti, pajak, bea cukai, dll. Kementerian

Keuangan merupakan bagian dari pemerintah dan instansi pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kemajuan keuangan akan berjalan dengan mudah jika diikuti oleh organisasi yang dapat diterima dalam penyelenggaraan rekening negara. Tugas penting *Service of Account* adalah mengawasi dana negara dan membantu para pelopor negara di bidang uang dan sumber daya negara. Dengan cara ini, *Service of Account* dapat menjadi penjaga gerbang dana negara.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pengurus rekening negara penting untuk keperluan administrasi negara. Administrasi keuangan negara adalah penyelenggaraan umum kewenangan penyelenggaraan moneter negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi: Pengaturan keuangan negara; Eksekusi dana negara; Pengelolaan dana negara; dan tanggung jawab moneter negara. Penyelenggaraan pendapatan moneter negara yang menjadi tugas pendeta uang sebagai pejabat keuangan negara secara keseluruhan penting untuk penyelenggaraan keuangan negara. Pengertian kas negara adalah kas yang dibatasi oleh pejabat keuangan negara secara keseluruhan, yang memasukkan rupiah dan uang asing. Kemudian, kas negara terdiri dari kas di tempat penyimpanan negara dan kas di tempat penyimpanan pendapatan dan penggunaan pejabat keuangan layanan negara atau organisasi pemerintah non-klerikal, dan perusahaan negara. Berikut pengukuran DAK yaitu :

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

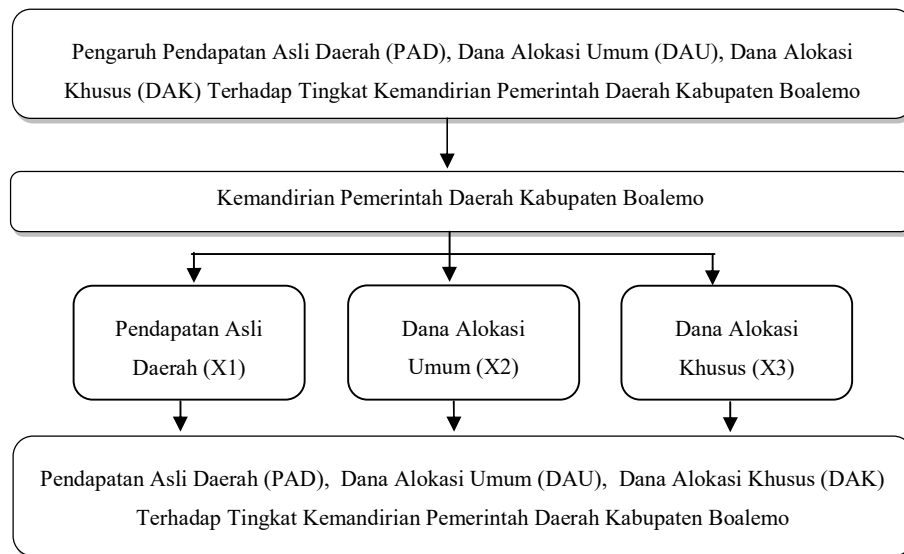
Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
1	Reza Mariska (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)	Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang	Riset menunjukan bahwa : 1) Pendapatan Asli Daerah secara signifikan memengaruhi derajat kebebasan moneter daerah. 2) Aset pembagian manfaat tidak memiliki dampak kritis yang adil dan setara kebebasan moneter. 3) Dana alokasi umum secara signifikan mempengaruhi derajat kebebasan moneter. 4) Penyimpanan penjabatan unik secara signifikan mempengaruhi tingkat kebebasan moneter teritorial.
2	Putri Ika Sari (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)	Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat independen keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap daerah tingkat indenpendensi keuangan.
3	Saptaningsih Sumarmi (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta	Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Namun dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal.
4	Krest D Tolosang (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli	Jurnal, Jurusan Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki

		Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon	Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado	pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota tomohon.
5	Nurul Hidayah Hary Setiawati (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta	Hasil penelitian menunjukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja langsung. Dana alokasi khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Struktur intuisi dalam penyelidikan ini bergantung pada pondasi masalah dan tujuan pemeriksaan bergantung pada hipotesis yang didalangi dalam perkembangan skema pemikiran. Struktur pemikiran adalah garis keyakinan yang disengaja yang membentuk premis gagasan logis pemeriksaan. Struktur hipotesis dari pemeriksaan ini adalah seperti yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tentang Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (Y) maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

- H₁** : Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo(Y).
- H₂** : Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo (Y).
- H₃** : Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo (Y).
- H₄** : Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo (Y).

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sebagai variabel independen (X) dan tingkat kemandirian pemerintah daerah sebagai variabel dependen (Y), yang menjadi objek riset ini adalah pegawai instansi pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Melalui riset ini mampu mendirikan teori yang dapat menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan fenomena. Sugiyono (2007) dimuat seluruhnya dalam Kustianigsih (2019).

3.3 Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan deskripsi yang akan dipakai pada riset ini untuk memberikan arahan dan batasan dalam pemecahan masalah. Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014) pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bentuknya ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentangnya dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: variabel bebas (variabel bebas) yaitu pendapatan asli

daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan kendala. Variabel (variabel terikat) yaitu kemandirian pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Operasional Variabel X

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) (Bastian, 2002)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu area dari sumber di dalam distriknya sendiri sesuai dengan hukum dan pedoman utama.	$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) (Saragih, 2003:104)	Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	$\text{Dana Alokasi Umum} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) (Yani, 2002:166)	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang besumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Tabel 3.2 Operasional Variabel Y

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kemandirian Pemerintah daerah(Y)	Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber transfer pusat (DAU, DAK dan DBH)	$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

Sumber :UU No. 23 Tahun 2014

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2010) menyatakan populasi merupakan wilayah *generalization* yang terbentuk dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Badan Keuangan Dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan triwulan I – IV dengan memakai aspek waktu selama 5 tahun (2015 – 2019).

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang dipakai sebagai teknik pengambilan sampel, artinya ada faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan saat melakukan teknik pengambilan sampel. Instansi dalam riset ini harus memiliki laporan keuangan selama periode penelitian (2015-2019). Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 laporan keuangan triwulanan, dan jangka waktu penelitian adalah 5 tahun, sehingga jumlah observasi adalah 4 triwulan x 5 tahun adalah sebanyak 20 pengamatan.

3.5 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Model dan sumber informasi yang dipakai pada riset ini: tergantung bagaimana informasi tersebut diperoleh, informasi semacam ini merupakan informasi penunjang, berdasarkan waktu, informasi dalam penelitian ini merupakan informasi gabungan, khususnya informasi silang (pengaturan waktu) dan waktu. informasi susunan (*cross section*) 3) Dilihat dari kecenderungannya, informasi yang digunakan adalah informasi kuantitatif.

3.5.2 Cara Pengumpulan Data

Metode yang dipakai pada pengambilan data antara lain: dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari instansi terkait BKAD Kabupaten Boalemo, penelitian literatur yang dilakukan di Universitas Ichsan Gorontalo, dan penyusunan serta penelitian erat kaitannya dengan penggunaan sistem komunikasi internet.

3.6 Prosedur Pengujian dan Instrumen Penelitian

3.6.1 Analisis Instrumen Penelitian

Metode analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah analisis kuantitatif, yang dilakukan untuk mentuntaskan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis klasik dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah data memenuhi hipotesis klasik. Pengujian hipotesis klasik diproses untuk menghindari bias. Karena tidak semua data regresi dapat diterapkan.

Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk menguji apakah pada modul relaps, variabel yang membutuhkan dan faktor bebas keduanya memiliki sirkulasi yang khas atau tidak. Modal kambuh yang layak adalah dengan melakukan penyebaran informasi biasa dari Ghozali (2016). Dalam pengujian sni, pengujian biasa menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov, dengan pengujian ini sangat baik dapat dilihat jika informasi yang digunakan biasanya disampaikan. Jika signifikan $> 0,05$, informasi tersebut diedarkan secara teratur. Kami menyarankan bahwa, jika kemungkinan harga di bawah $0,05$, informasi yang disebarkan dalam penyelidikan ini tidak biasa.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dirancang dapat mengevaluasi apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel terpilih, sedangkan variabel independen lainnya tidak menjelaskan hal ini. Oleh karena itu nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Nilai kritis yang biasa digunakan untuk menyatakan multikolinearitas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

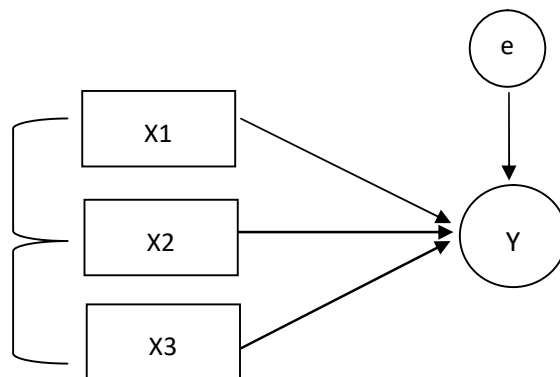
3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan variabel residual yang tidak konstan dalam proses regresi, sehingga keakuratan hasil prediksi diragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan, termasuk nilai sisa penghapusan pelajar yang diprediksi. Dari mode gambar *scatter plot* model, kita dapat melihat bagaimana cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model. Analisis citra *scatter plot* dan tunjukkan bahwa model regresi linier sederhana tidak memiliki heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah mean square error atau tidak ada heteroskedastisitas Ghazali (2009).

3.7 Rancangan Uji Hipotesis

3.7.1 Model/Gambar

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Regresi Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan

Y	: Kemandirian pemerintah daerah
a	: Konstanta
X₁	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X₂	: Dana Alokasi Umum (DAU)
X₃	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
b₁	: Koefisien Regresi PAD
b₂	: Koefisien Regresi DAU
b₃	: Koefisien Regresi DAK
ε	: <i>error tern model</i>

3.7.2 Langkah - Langkah Pengujian Hipotesis

Penggunaan regresi berganda menggunakan bantuan perangkat lunak *SPSS* dan *MS. Excel for windows* serta metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang terdiri dari :

- 1) Pengujian statistik deskriptif yaitu statistik deskriptif dapat meringkas atau mendeskripsikan data dilihat dari mean (mean), standar deviasi, varians, maximum, minimum, sum, range, kurtosis. Ghazali, (2009).
- 2) Pengujian persamaan regresi linier berganda yaitu pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis linier berganda yang dirancang untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang terpengaruh disebut variabel dependen atau variabel dependen.

Linearitas harus diterapkan pada relaps yang berbeda karena memiliki lebih dari satu variabel otonom, model relaps yang berbeda harus lurus jika memenuhi prasyarat linieritas, misalnya, informasi biasa (baik secara terpisah maupun dalam

model), dibebaskan dari praduga tradisional pengukuran multikolinear, autokorelasi, heteroskedastisitas.

3) Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y) Ghazali, (2009). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 (untuk tingkat signifikan = 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Pengujian statistik t pada dasarnya memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen Ghazali (2009). Uji t juga dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t. Gunakan SPSS untuk setiap variabel yang termasuk dalam output hasil regresi. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (untuk tingkat signifikan = 5%), maka variabel independen secara satu persatu tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05 maka variabel independen secara satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi dirancang untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Saat menguji hipotesis pertama, koefisien determinan dapat dilihat dari nilai R Square (R²) untuk mengetahui variabel independen (yaitu kemampuan), tingkat penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R² bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas Ghazali (2009).

Pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R – Square*. Kelemahan penggunaan R² adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Untuk setiap tambahan variabel independen, terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, nilai R² akan meningkat. Tidak seperti R², setelah menambahkan variabel independen ke model, nilai R-squared yang disesuaikan dapat dinaikkan atau diturunkan, Ghazali (2009). Oleh karena itu, digunakan *Adjusted R – Square* pada saat mengevaluasi model regresi linier berganda.

3.7.3 Sistem Pengolahan Data Dengan Komputer

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perangkat komputer dalam melakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 24 dan dibantu dengan program MS. Excel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor BKAD

Lahirnya UU No. 50 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di tanah air. Salah satu poin penting adalah disahkannya Kabupaten Boalemo oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999 bersama dilantiknya pejabat Ir. Iwan Bokings, MM sebagai Bupati Boalemo di Jakarta.

Di bidang pemerintah penataan lembaga pemerintah Daerah telah terbentuknya itu Dinas, Kantor, Badan dan Bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah. Dimana Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh salah satu bagian, yaitu bagian Keuangan. Namun peraturan pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan adanya penataan kembali organisasi perangkat daerah, sehingga Bagian Keuangan Setda Boalemo mengalami perubahan nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD, yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 15 tahun 2005, yang organisasinya terdiri dari Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang Pendapatan, Bidang Belanja, Bidang Kekayaan dan Aset, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

BKAD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan.

Seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2016 Badan Pengelolaan Keuangan (BPKAD) mengalami perubahan nama menjadi Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat serta peraturan Bupati Boalemo No. 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

Sesuai dengan amanat Perda dan Perbup tersebut diatas maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (BPKAD) mengalami perubahan nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (BKAD). Adapun yang menjadi Kepala Badan BKAD Kabupaten Boalemo bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Kepala BKAD Kabupaten Boalemo

No	Nama	Tahun
1	Ibrahim Darwis, SE	Periode 2006 s/d 2008
2	Mohamad Usman, SE	Periode 2008 s/d 2012
3	Sukril Gobel, SE., M.Si	Periode 2012 s/d 2017
4	Ir. Sunandar Bokings	Periode 2018 s/d 2019
5	Sofyan Hasan, ST., MM	Periode 2019 s/d 2020
6	Sri Tantri Putri Yanti Manto	Periode 2020 (Plt)
7	Yakob Jusuf Musa	Periode 2021 Berjalan (Plt)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo melaksanakan 3 (tiga) program :

1. Program peningkatan administrasi keuangan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.1.2 Visi Dan Misi BKAD Kabupaten Boalemo

a) Visi BKAD Kabupaten Boalemo

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel, Mandiri Dan Profesional “

b) Misi BKAD Kabupaten Boalemo

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas SDM aparat pengelola keuangan daerah.
2. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkualitas dan dapat diakses oleh stakeholders.
4. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

4.1.3 Tugas BKAD Kabupaten Boalemo

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok adalah *”penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah*

dibidang keuangan dan aset daerah”. Adapun tugas dalam masing-masing bidang sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi serta aset.

2) Sekretaris

Melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan, yang meliputi kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Sekretariat Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta aset badan keuangan.
- b. Sub Bagian Keuangan** melaksanakan penatausahaan dan administrasi keuangan BKAD.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program** melaksanakan penyusunan dan perencanaan program kegiatan serta pelaporan.

3) Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan

Menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis penganggaran dan perbendaharaan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Bidang anggaran dan perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Anggaran** membantu kepala bidang anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dibidang penganggaran.

- b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan** membantu kepala bidang anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dibidang perbendaharaan.

4) Bidang Pendapatan

Menyusun pedoman dan juknis pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah. Bidang pendapatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 Kepala Sub Bidang yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan** tugas pokok membantu melakukan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek pajak.
- b. Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan** tugas pokok adalah untuk menyusun penerimaan, penagihan dan pelaporan.

5) Bidang Aset

Tugas pokok dalam bidang aset adalah melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. Bidang aset Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset I**
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset II**

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset I dan Kepala Sub Bidang Pengendalian II adalah untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah.

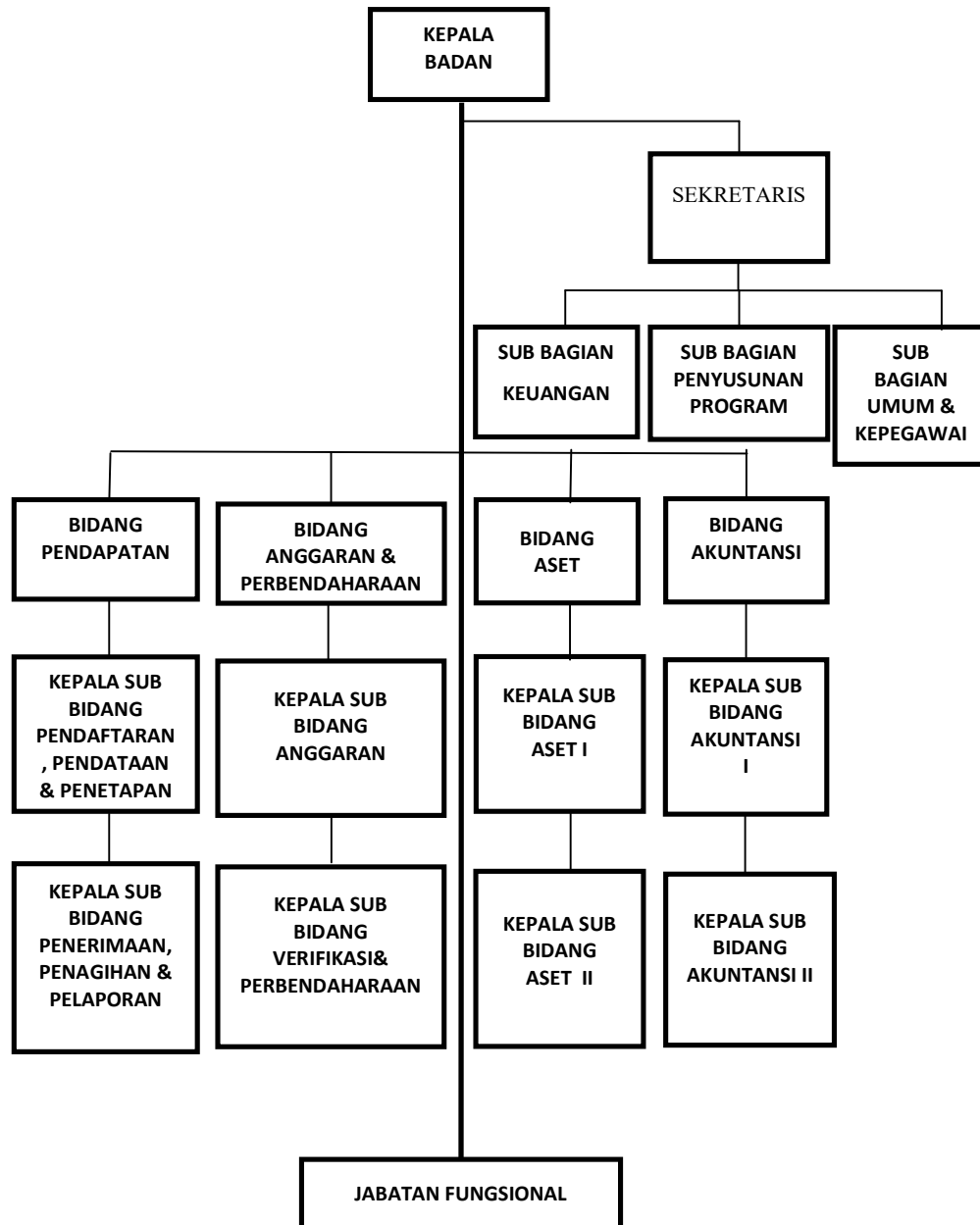
6) Bidang Akuntansi

Mengkoordinasikan, menyusun pedoman teknis dan mengevaluasi kegiatan akuntansi daerah. Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu :

- a. **Kepala Sub Bidang Akuntansi I**
- b. **Kepala Sub Bidang Akuntansi II**

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi I dan Kepala sub bidang akuntansi II adalah untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Boalemo



Gambar 4.1
Struktur BKAD Kab. Boalemo

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik dengan tugas-tugas sebagai berikut: mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, kemudian menampilkan data tersebut dalam bentuk yang baik. Beberapa konten yang terdapat pada bagian ini adalah mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan menyajikan data. Djarwanto (2001:2).

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, maka statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean (rata-rata) dan standar deviasi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik

	Minimum	Maxsimum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.02	.13	.0625	.02468
Dana Alokasi Umum (X2)	.06	1.08	.2405	.22839
Dana Alokasi Khusus (X3)	.55	1.91	.7200	.30387
Kemandirian Pemerintah Daerah (Y)	.02	.16	.0720	.02931

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

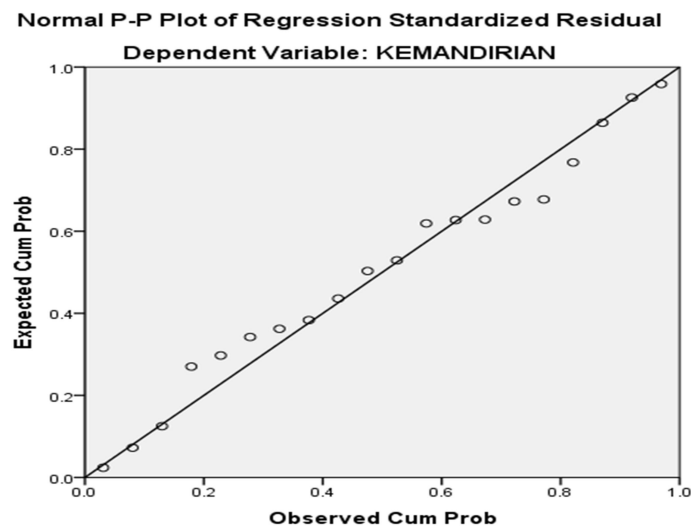
Berdasarkan tabel 4.2, diketahui pendapatan asli daerah minimum adalah 0,02 dan maksimum 0,13. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari pendapatan asli daerah adalah 0,0625 dan 0,02468. Diketahui dana alokasi umum minimum adalah 0,06 dan maksimum 1.08. Sementara rata-rata dan standar deviasi dana alokasi umum adalah 0,2405 dan 0,22839. Diketahui dana alokasi khusus

minimum adalah 0,55 dan maksimum 1.91. Sementara rata-rata dan standar deviasi dana alokasi khusus adalah 0,7200 dan 0,30387. Diketahui nilai kemandirian pemerintah daerah minimum adalah 0,02 dan maksimum 0,16. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari kemandirian pemerintah daerah adalah 0,0720 dan 0,02931.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan hasil dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik P-P dari grafik normal residual standar regresi. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar diagonal, dan arah penyebaran mengikuti arah diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

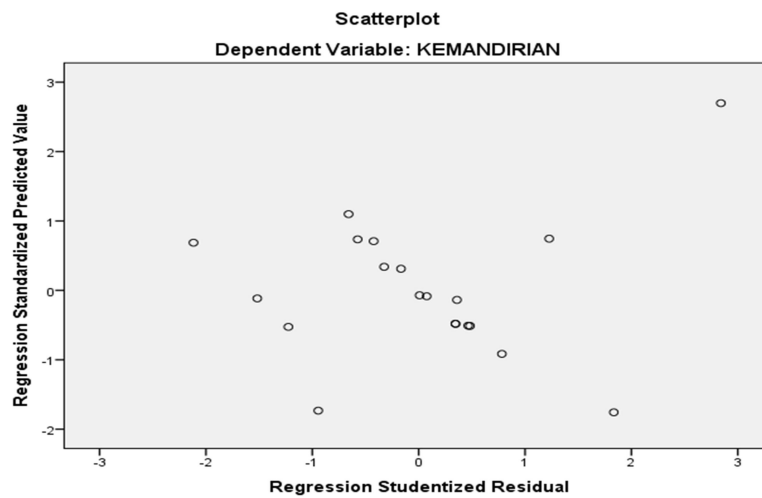
Coefficients ^a			
Model		Correlations	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.773	1.294
	DAK	.169	5.934
	DAU	.161	6.214

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai VIF dari Pendapatan Asli Daerah adalah 1.294, nilai VIF dari Dana Alokasi Umum adalah 6.214 dan nilai VIF dari Dana Alokasi Khusus adalah 5.934. Karena masing-masing nilai VIF tidak lebih besar dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas yang berat.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Metode random scatter plot dapat digunakan untuk deteksi heteroskedastisitas tanpa membentuk pola tertentu, dan arah difusinya berada di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi laporan keuangan dengan variabel yang mempengaruhinya yakni tingkat kemandirian daerah.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukan pengujian hipotesis klasik, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penjelasan terhadap model regresi berganda.

Tabel 4.4 Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.001	.007		.138	.892
	PAD	1.170	.063	.985	18.615	.000
	DAU	.007	.015	.058	.499	.625
	DAK	-.005	.011	-.056	-.493	.629

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.4, maka persamaan regresi yang terjadi pada uji regresi ini adalah

$$Y = 0.001 + 1.170X_1 + 0.007X_2 - 0.005X_3 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 0.001 menunjukkan bahwa, jika variabel independen (PAD, DAU dan DAK) bernilai nol, maka nilai variabel dependen (tingkat kemandirian pemerintah daerah) sebesar 0.001.
2. Koefisien X_1 (b_1) adalah 1.170 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah (Y). Artinya, jika variabel pendapatan asli daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sebesar 1.170.
3. Koefisien X_2 (b_2) adalah 0.007 menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (X_2) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah (Y). Artinya, jika variabel dana alokasi umum ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sebesar 0.007.

4. Koefisien X_3 (b_3) adalah - 0.005 menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus (X_3) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah (Y). Artinya, jika variabel dana alokasi khusus ditingkatkan maka akan mengurangi kemandirian pemerintah daerah sebesar 0.005.
5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

2) Uji R^2 (koefisien determinasi)

Pengujian koefisien determinasi dirancang untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan seberapa besar variabel dependen tersebut.

Tabel 4.5 Hasil Uji R^2

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.983 ^a	.965	.959	.00595	.965	148.541	3

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber :Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.5 diatas terdapat angka R sebesar 983^a yang menunjukan bahwa hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dengan variabel independen sangat erat, karena berada di definisi kuat yang angkanya di atas 0.4. sedangkan nilai R square sebesar 965 atau 96.5% menunjukan bahwa variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi

husus sebesar 96.5% sedangkan sisanya 3,5% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

3) Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji signifikan pengaruh koefisien regresi parsial secara menyeluruh merupakan suatu uji untuk menguji apakah seluruh koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan sama dengan nol atau tidak. Gujarati (2003). Dengan kata lain, menguji apakah variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Berikut ini adalah tabel uji pengaruh simultan (Uji F).

Tabel 4.6
Uji Pengaruh Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresions	.016	3	.005	148.541	.000 ^b
Residual	.001	16	.000		
Total	.016	19			

a. Dependent Variabel: KEMANDIRIAN

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menyajikan nilai sig. adalah $0.000 < 0.05$, maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas signifikan secara statistik terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah. Diketahui nilai F hitung 148.541, maka pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas signifikan secara statistik terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa **hipotesis pertama (H_1) diterima** dan bermakna pendapatan

asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten boalemo.

4) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dilakukan untuk membuktikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji dan melihat nilai signifikansi t hitung, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Y).

a) Pengujian hipotesis kedua (H_2)

Berdasarkan tabel 4.4 membuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah. Hasil olahan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu sebesar 1.170. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian bahwa **H_2 diterima**, dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah.

b) Pengujian hipotesis ketiga (H_3)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah. Hasil olahan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,625 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu sebesar 0.007. Jadi hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H_3 ditolak**.

c) Pengujian hipotesis keempat (H_4)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah. Hasil olahan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,629 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai -0.005. Jadi hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H_4 ditolak**.

4.3 Hasil Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Bersumber pada hasil uji simultan (uji F) menampilkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus mempengaruhi signifikan terhadap tingkatan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Hasil tersebut menampilkan terdapatnya ketiga variabel independen tersebut berakibat pada kenaikan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Maksudnya, daerah perkotaan dengan PAD lebih besar hendak memastikan arah serta toleransi pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana transfer yakni (DAU dan DAK).

Dalam konteks teori signalling, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintah yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggung jawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

Tingkatan kemandirian daerah menampilkan bahwa pemerintah sanggup membiayai sendiri pada aktivitas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat, serta aktivitas tersebut sudah membayar pajak serta retribusi selaku penerimaan daerah. Kemandirian daerah diarahkan oleh besar kecilnya PAD

dibanding dengan pemasukan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya transfer pusat (DAU, DAK, DBH) ataupun dari pinjaman.

Seiring berkembangnya otonomi daerah, berbagai daerah telah memperoleh sebagian dari kewenangan desentralisasi dari pemerintah pusat yang dulunya menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Oleh karena itu, agar pelaksanaan wewenang yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan, dan sumber pembiayaan dapat diperoleh dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan potensi daerah.

Tentunya hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mengatur bahwa daerah berhak memperoleh sumber pendanaan, antara lain: menentukan sumber pendanaan yang dapat disediakan pemerintah berdasarkan urusan pemerintahan yang diajukan; hak untuk memungut dan menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah, dan hak untuk membagisumber daya Nasional di daerah dan hasil dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan memperoleh sumber pendapatan lain yang sah dan sumber pembiayaan lain.

Terpaut otonomi daerah, tugas pokok pemerintah daerah merupakan tingkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya dengan sediakan fasilitas serta prasarana yang penuh kebutuhan masyarakat, tetapi tidak seluruh daerah mempunyai kapasitas yang mencukupi buat mendanai fasilitas serta prasarana tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka menolong daerah dalam sediakan

fasilitas serta prasarana buat penuhi kebutuhan dasar warga, pemerintah pusat membagikan dorongan keuangan lewat dana alokasi khusus.

Hasil riset ini sejalan dengan Susanti dkk (2015), yang mennjelaskan bahwa secara bersama- sama PAD, DAU, DAK mempengaruhi positif serta signifikan terhadap tingkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011- 2014. Studi yang sama pula sejalan dengan Simbolon (2011), yang menarangkan kalau secara bersama - sama Rasio Efektivitas PAD, DBH, DAU serta DAK mempengaruhi signifikan terhadap tingkatan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Kustianigsih dkk, (2019).

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Hasil riset menerangkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkatan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Dalam perihal ini, bila PAD suatu daerah lebih besar dari dorongan pemerintah pusat/ provinsi serta pinjaman sehingga daerah tersebut mandiri secara finansial, sehingga pemerintah pusat bisa kurangi perimbangan alokasi dana ke daerah tersebut. Kebalikannya, bila PAD sesuatu daerah lebih kecil dari pinjaman daerah serta dorongan pemerintah pusat/ provinsi(semacam DAU, DAK, DBH), daerah tersebut tidak mandiri secara finansial sebab daerah tersebut masih tergantung pada pemerintah pusat. Marizka (2013).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah lebih berarti daripada sumber pendapatan lain, sebab

PAD ialah sumber keuangan daerah yang digali di daerah terpaut, sehingga sumber PAD wajib dimaksimalkan buat tingkatkan keahlian keuangan daerah. Dana bantuan pemerintah pusat semacam DAU, DAK serta DBH dan bentuk pembayaran transfer yang ada hanya membagikan dorongan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan wilayah. PAD bisa ditingkatkan dengan tingkatkan pemungutan pajak serta retribusi yang ada. Kenaikan kemandirian tidak hendak terjalin apabila tidak terdapat peran dan masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi. Kustianingsih, dkk (2019).

Bersumber pada hasil riset yang melaporkan terdapatnya pengaruh PAD terhadap tingkatan kemandirian pemerintah daerah sekaligus searah dengan riset yang dicoba oleh Tahar dkk (2011), Hanafih (2012), serta Nur'ainy dkk (2013) yang menemukan jika pendapatan asli daerah mempengaruhi signifikan serta positif terhadap tingkatan kemandirian pemerintah daerah. Dengan PAD yang kecil, pemerintah daerah pada biasanya tergantung pada transfer daerah. Tetapi sangat disayangkan pada saat dana tersebut sebagian besar dihabiskan buat belanja pegawai. Sehingga jatah buat belanja modal yang dapat menambah penerimaan PAD tidak sempurna dampaknya pembangunan di daerah tidak begitu terasa.

3) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Hasil riset menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan kemandirian pemerintah daerah

Kabupaten Boalemo. Kepentingan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditetapkan dengan memakai pendekatan fiscal gap, ialah ditetapkan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum dipakai buat menutup celah yang berlangsung sebab keperluan daerah melebihi dari kemampuan penerimaan daerah yang ada. (UU Nomor. 34 Tahun 2004).

Salah satu hambatan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan terdapatnya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Untuk menanggulangi perihal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah salah satunya merupakan pemberian DAU. Daerah dengan keahlian fiskal rendah hendak memperoleh DAU dalam jumlah yang relatif besar, kebalikannya wilayah yang memiliki kemampuan fiskal besar hendak mendapatkan DAU dalam jumlah kecil. Pelimpahan DAU sangat diharapkan betul - betul bisa kurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkatan kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Adi (2008).

Efisiensi penggunaan DAU tidak tinggi, karena DAU tidak memiliki indikator kinerja yang jelas. Target kinerja harus diikuti setelah DAU diberikan, kemudian dilaporkan ke Menteri Keuangan. Dikala ini tidak terdapat sanksi yang tegas serta jelas dan kontrol seperti apa, ini permasalahan yang terjal. Daerah semanya saja memakai DAU asal bisa terserap dengan baik tanpa mementingkan *outcome* serta *impact* dari DAU itu sendiri. Kustianingsih dkk, (2015).

Studi ini sejalan dengan Marizka (2013), yang menemukan jika Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkatan kemandirian keuangan daerah. Maksudnya bila pemakaian DAU yang dialokasikan oleh pemerintah pusat belum digunakan serta dimanfaatkan secara efektif serta efisien oleh daerah berarti pemakaian dana tersebut belum menggapai sasaran ataupun tujuan kepentingan publik dan penggunaanya belum menciptakan output yang optimal ataupun berdaya guna.

4) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Hasil riset menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Artinya jika terus menjadi tinggi transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah terus menjadi rendah, begitu kebalikannya, semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat hingga tingkat kemandirian pemerintah daerah terus menjadi besar.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan tidak hanya Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil. Tujuan DAK buat mengecilkan beban bayaran aktivitas khusus yang wajib ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK ditunjukan pada aktivitas investasi pembangunan, pengadaan, kenaikan, revisi sarana serta prasarana fisik pelayanan publik dengan usia ekonomis panjang. DAK dipakai buat menutup kesenjangan pelayanan publik antar wilayah dengan membagi prioritas pada bidang

pembelajaran, kesehatan, infrastruktur, kelautan serta perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan wilayah, serta lingkungan hidup. Bilamana dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus dipakai buat pembangunan serta rehabilitasi fasilitas serta prasarana fisik ini bisa menolong mengatasi kemiskinan serta secara umum bisa digunakan buat membangun perekonomian nasional. (UU No. 33 Tahun 2004).

Riset ini searah dengan Marizka (2013), Ika sari (2015) dan Kustianingsih dkk (2019), yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkatan kemandirian daerah. Artinya jika semakin besar transfer DAK dari pemerintah pusat, sehingga tingkatan kemandirian daerah terus menjadi rendah. DAK yang dialokasikan pemerintah ke wilayah tertentu dimaksudkan buat mendanai aktivitas tersebut yang jadi prioritas nasional. Oleh sebab itu pemakaian DAK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa memakainya buat keperluan lain. DAK akan diberikan ke daerah yang memenuhi syarat setiap tahun. Pemakaian dana tersebut diprioritaskan untuk proses pembangunan prasarana serta prasarana fisik untuk pelayanan dasar dan pelayanan masyarakat. Makruf (2011).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil ($<$) 0.05.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil ($<$) dari 0.05.
3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan tingkat signifikansi sebesar 0.629 atau lebih besar ($>$) dari 0.05.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan tingkat signifikansi sebesar 0.629 atau lebih besar ($>$) dari 0.05.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemnda diharapkan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi juga pemda terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi serta penggunaan bujet secara efektif dan efisien, sehingga secara perlahan menurunkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian belanja fiskal daerah, sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya lebih banyak peneliti yang bisa mengkaji isu-isu yang mempengaruhi tingkat kemandirian pemerintah daerah dengan menambahkan variabel lain, sehingganya bisa menambah referensi untuk memperkuat pengetahuan serta menentukan komponen lain yang menjadi faktor penentu jenjang tersebut. Kemandirian pemerintah daerah; dan melalui *interview* langsung untuk menambah data yang lebih efektif dan lengkap, sehingga meningkatkan metode penelitian. Tambahkan kerangka waktu penelitian agar bisa digeneralisasikan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa). *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya, 06 September 2008.
- Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS “. Semarang : UNDIP.
- Hidayat, H. (2011). Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal *J. J. Sej. CITRA LEKHA*, 15(1), 19-32.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Marizka, Reza. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011)." *Jurnal Akuntansi* 1.3 (2013).
- Mayasari, (2012). Tentang *Signalling Theory*
- Nadifa, H. T. (2017). *Analisis Dampak Kelebihan Setoran Pelimpahan Pajak Oleh Bank Ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Nasution, A. P. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 192-206.
- Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Pasal 1 Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum.
- PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

- PP No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi. Galia Indonesia : Jakarta.
- Sari, Putri Ika. "Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di DIY Periode 2007-2014)." (2015): 537-545.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tolosang, Krest D. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18.3 (2018).
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menyatakan Bahwa Daerah Diberikan Hak Untuk Mendapatkan Sumber Keuangan.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wardhana, Adhitya, et al. "Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia." *Sosiohumaniora* 15.2 (2013): 111-118.

1. LAMPIRAN DATA ORDINAL

Tahun	Triwulan	PAD	Total Pendapatan	Hasil (%)
2015	Tw.1	Rp4,457,367,863	Rp182,270,261,074	0.02
	Tw.2	Rp17,274,601,482	Rp346,059,516,011	0.05
	Tw.3	Rp22,746,545,828	Rp531,683,809,610	0.04
	Tw.4	Rp43,432,090,348	Rp710,800,689,088	0.06
2016	Tw.1	Rp4,537,516,920	Rp241,051,586,968	0.02
	Tw.2	Rp21,684,661,546	Rp421,105,016,455	0.05
	Tw.3	Rp31,706,036,886	Rp590,089,818,867	0.05
	Tw.4	Rp48,794,270,892	Rp785,937,545,310	0.06
2017	Tw.1	Rp14,467,237,645	Rp191,180,686,052	0.08
	Tw.2	Rp23,667,468,251	Rp410,472,512,065	0.06
	Tw.3	Rp41,801,077,823	Rp600,503,435,389	0.07
	Tw.4	Rp71,687,164,839	Rp844,634,717,802	0.08
2018	Tw.1	Rp12,308,978,152	Rp207,576,209,383	0.06
	Tw.2	Rp21,633,176,521	Rp421,448,120,453	0.05
	Tw.3	Rp34,308,407,166	Rp648,675,958,636	0.05
	Tw.4	Rp56,019,131,871	Rp840,597,328,952	0.07
2019	Tw.1	Rp28,143,723,722	Rp211,785,881,274	0.13
	Tw.2	Rp37,964,601,919	Rp434,797,003,859	0.09
	Tw.3	Rp52,704,079,571	Rp641,000,405,215	0.08
	Tw.4	Rp70,712,830,833	Rp869,820,806,157	0.08

Tahun	Triwulan	DAU	Total Pendapatan	Hasil (%)
2015	Tw.1	Rp135,316,116,000	Rp182,270,261,074	0.74
	Tw.2	Rp236,803,203,000	Rp346,059,516,011	0.68
	Tw.3	Rp338,290,290,000	Rp531,683,809,610	0.64
	Tw.4	Rp405,948,366,000	Rp710,800,689,088	0.57
2016	Tw.1	Rp460,627,546,000	Rp241,051,586,968	1.91
	Tw.2	Rp460,627,546,000	Rp421,105,016,455	1.09
	Tw.3	Rp392,748,146,635	Rp590,089,818,867	0.67
	Tw.4	Rp472,959,633,000	Rp785,937,545,310	0.60
2017	Tw.1	Rp115,615,476,460	Rp191,180,686,052	0.60
	Tw.2	Rp273,608,497,110	Rp410,472,512,065	0.67
	Tw.3	Rp379,648,071,360	Rp600,503,435,389	0.63
	Tw.4	Rp462,433,742,273	Rp844,634,717,802	0.55
2018	Tw.1	Rp151,913,727,200	Rp207,576,209,383	0.73
	Tw.2	Rp267,139,858,500	Rp421,448,120,453	0.63
	Tw.3	Rp383,599,886,300	Rp648,675,958,636	0.59
	Tw.4	Rp461,114,882,414	Rp840,597,328,952	0.55
2019	Tw.1	Rp157,302,932,600	Rp211,785,881,274	0.74
	Tw.2	Rp276,653,863,100	Rp434,797,003,859	0.64
	Tw.3	Rp397,401,185,500	Rp641,000,405,215	0.62
	Tw.4	Rp476,422,586,431	Rp869,820,806,157	0.55

Tahun	Triwulan	DAK	Total Pendapatan	Hasil (%)
2015	Tw.1	Rp25,057,083,000	Rp182,270,261,074	0.14
	Tw.2	Rp49,366,313,500	Rp346,059,516,011	0.14
	Tw.3	Rp97,103,581,000	Rp531,683,809,610	0.18
	Tw.4	Rp174,949,070,000	Rp710,800,689,088	0.25
2016	Tw.1	Rp259,806,709,000	Rp241,051,586,968	1.08
	Tw.2	Rp259,806,709,000	Rp421,105,016,455	0.62
	Tw.3	Rp115,291,376,000	Rp590,089,818,867	0.20
	Tw.4	Rp174,931,807,112	Rp785,937,545,310	0.22
2017	Tw.1	Rp10,911,064,000	Rp191,180,686,052	0.06
	Tw.2	Rp59,966,995,902	Rp410,472,512,065	0.15
	Tw.3	Rp118,759,991,902	Rp600,503,435,389	0.20
	Tw.4	Rp211,831,753,187	Rp844,634,717,802	0.25
2018	Tw.1	Rp22,025,858,241	Rp207,576,209,383	0.11
	Tw.2	Rp69,088,343,241	Rp421,448,120,453	0.16
	Tw.3	Rp158,443,195,691	Rp648,675,958,636	0.24
	Tw.4	Rp209,589,456,124	Rp840,597,328,952	0.25
2019	Tw.1	Rp17,586,347,849	Rp211,785,881,274	0.08
	Tw.2	Rp45,731,900,514	Rp434,797,003,859	0.11
	Tw.3	Rp105,358,598,530	Rp641,000,405,215	0.16
	Tw.4	Rp184,065,294,812	Rp869,820,806,157	0.21

Tahun	Triwulan	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Hasil (%)
2015	Tw.1	Rp4,457,367,863	Rp176,093,282,875	0.03
	Tw.2	Rp17,274,601,482	Rp325,081,756,302	0.05
	Tw.3	Rp22,746,545,828	Rp499,427,310,952	0.05
	Tw.4	Rp43,432,090,348	Rp652,431,091,952	0.07
2016	Tw.1	Rp4,537,516,920	Rp233,242,551,523	0.02
	Tw.2	Rp21,684,661,546	Rp392,095,867,485	0.06
	Tw.3	Rp31,706,036,886	Rp546,249,103,035	0.06
	Tw.4	Rp48,794,270,892	Rp708,266,434,512	0.07
2017	Tw.1	Rp14,467,237,645	Rp174,926,540,460	0.08
	Tw.2	Rp23,667,468,251	Rp381,100,305,812	0.06
	Tw.3	Rp41,801,077,823	Rp546,222,188,062	0.08
	Tw.4	Rp71,687,164,839	Rp748,883,523,460	0.10
2018	Tw.1	Rp12,308,978,152	Rp188,533,101,241	0.07
	Tw.2	Rp21,633,176,521	Rp380,008,749,141	0.06
	Tw.3	Rp34,308,407,166	Rp585,823,629,391	0.06
	Tw.4	Rp56,019,131,871	Rp743,671,917,538	0.08
2019	Tw.1	Rp28,143,723,722	Rp174,889,280,449	0.16
	Tw.2	Rp37,964,601,919	Rp376,576,051,814	0.10
	Tw.3	Rp52,704,079,571	Rp556,950,072,230	0.09
	Tw.4	Rp70,712,830,833	Rp750,805,028,243	0.09

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1)

PAD					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.02	2	10.0	10.0	10.0
	.04	1	5.0	5.0	15.0
	.05	5	25.0	25.0	40.0
	.06	4	20.0	20.0	60.0
	.07	2	10.0	10.0	70.0
	.08	4	20.0	20.0	90.0
	.09	1	5.0	5.0	95.0
	.13	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Mean	.0625
Median	.0600
Std. Deviation	.02468
Variance	.001
Minimum	.02
Maximum	.13
Sum	1.25

b. Variabel Dana Alokasi Umum (X_2)

DAU					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.06	1	5.0	5.0	5.0
	.08	1	5.0	5.0	10.0
	.11	2	10.0	10.0	20.0
	.14	2	10.0	10.0	30.0
	.15	1	5.0	5.0	35.0
	.16	2	10.0	10.0	45.0
	.18	1	5.0	5.0	50.0
	.20	2	10.0	10.0	60.0
	.21	1	5.0	5.0	65.0
	.22	1	5.0	5.0	70.0

.24	1	5.0	5.0	75.0
.25	3	15.0	15.0	90.0
.62	1	5.0	5.0	95.0
1.08	1	5.0	5.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Mean	.2405
Median	.1900
Std. Deviation	.22839
Variance	.052
Minimum	.06
Maximum	1.08
Sum	4.81

c. Variabel Dana Alokasi Khusus

DAK				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	.55	3	15.0	15.0
	.57	1	5.0	20.0
	.59	1	5.0	25.0
	.60	2	10.0	35.0
	.62	1	5.0	40.0
	.63	2	10.0	50.0
	.64	2	10.0	60.0
	.67	2	10.0	70.0
	.68	1	5.0	75.0
	.73	1	5.0	80.0
	.74	2	10.0	90.0
	1.09	1	5.0	95.0
	1.91	1	5.0	100.0
	Total	20	100.0	

Mean	.7200
Median	.6350
Std. Deviation	.30387
Variance	.092
Minimum	.55
Maximum	1.91
Sum	14.40

d. Variabel Kemandirian Pemerintah Daerah (Y)

KEMANDIRIAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.02	1	5.0	5.0	5.0
	.03	1	5.0	5.0	10.0
	.05	2	10.0	10.0	20.0
	.06	5	25.0	25.0	45.0
	.07	3	15.0	15.0	60.0
	.08	3	15.0	15.0	75.0
	.09	2	10.0	10.0	85.0
	.10	2	10.0	10.0	95.0
	.16	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Mean	.0720
Median	.0700
Std. Deviation	.02931
Variance	.001
Minimum	.02
Maximum	.16
Sum	1.44

3. LAMPIRAN DATA HASIL UJI HIPOTESIS

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
KEMANDIRIAN	.0720	.02931	20
PAD	.0625	.02468	20
DAK	.7200	.30387	20
DAU	.2405	.22839	20

Correlations					
		KEMANDIRIAN	PAD	DAK	DAU
Pearson Correlation	KEMANDIRIAN	1.000	.982	-.433	-.462
	PAD	.982	1.000	-.436	-.476
	DAK	-.433	-.436	1.000	.912
	DAU	-.462	-.476	.912	1.000
Sig. (1-tailed)	KEMANDIRIAN	.	.000	.028	.020
	PAD	.000	.	.027	.017
	DAK	.028	.027	.	.000
	DAU	.020	.017	.000	.
N	KEMANDIRIAN	20	20	20	20
	PAD	20	20	20	20
	DAK	20	20	20	20
	DAU	20	20	20	20

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD, DAK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

b. All requested variables entered.

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.983 ^a	.965	.959	.00595	.965	148.541	3

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

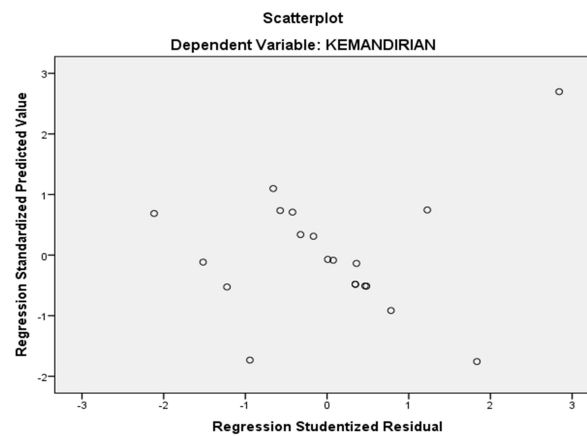
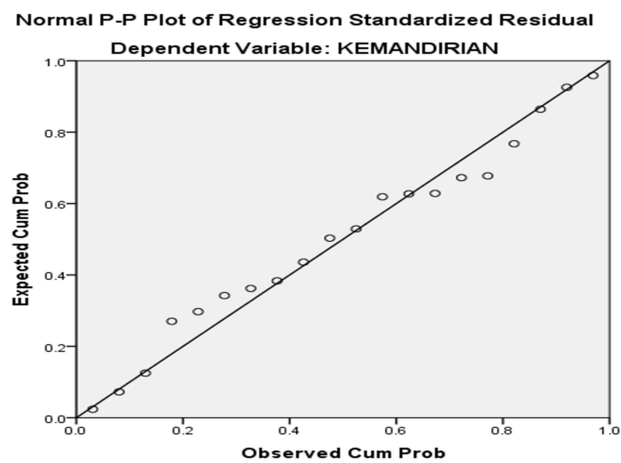
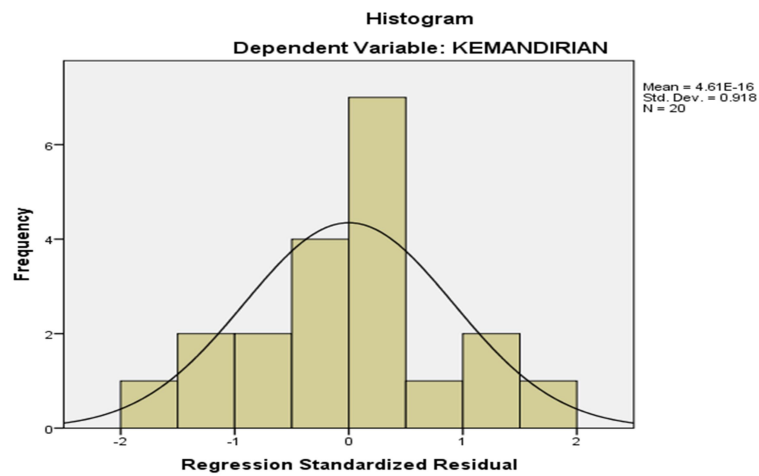
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.016	3	.005	148.541	.000 ^b
	Residual	.001	16	.000		
	Total	.016	19			

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	.001	.007		.138	.892	
	PAD	1.170	.063	.985	18.615	.000	.982
	DAK	-.005	.011	-.056	-.493	.629	-.433
	DAU	.007	.015	.058	.499	.625	-.462

Coefficients ^a					
Model		Correlations			
		Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)				
	PAD	.978	.866	.773	1.294
	DAK	-.122	-.023	.169	5.934
	DAU	.124	.023	.161	6.214





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3011/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA KESBANGPOL KAB. BOALEMO

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Yulingsi Lukman
NIM : E1117108
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR BKAD KABUPATEN BOALEMO
Judul Penelitian : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 Desember 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Merdeka, Tilamuta ■ (0443) 211174

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 800/18/BKAD/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Tantri Putriyani S. Manto, S.Sos., M.Si.
 N I P : 19840104 200501 2 007
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boalemo

Berdasarkan rekomendasi dari Kantor Kesbang Pol Kabupaten Boalemo nomor 070/KesbangPol/141/II/2021 kepada :

Nama : Yulingsi Lukman
 NIM : E1117108

Memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Studi Kasus BKAD Kabupaten Boalemo)" di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo selama dua bulan terhitung tanggal 3 Februari s.d 1 April 2021.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta
 Pada Tanggal : 3 Januari 2021

a.n. Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BOALEMO
 SEKRETARIS

↓ Sri Tantri Putriyani S. Manto, S.Sos., M.Si.
 Penata Tk. I, III/d
 NIP 19840104 200501 2 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0056/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YULINGSI LUKMAN
NIM : E1117108
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Studi Kasus BKAD Kabupaten

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

3/27/2021

Yulingsi Lukman.docx - E11.17.108



Yulingsi Lukman.docx
Mar 27, 2021
12960 words / 85306 characters

E11.17.108

Yulingsi Lukman.docx

Sources Overview

28%

OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.untad.ac.id	INTERNET	5%
2	ejournal.unp.ac.id	INTERNET	2%
3	jurnal.pancabudi.ac.id	INTERNET	2%
4	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	2%
5	repositori.uin-alaudhin.ac.id	INTERNET	1%
6	docplayer.info	INTERNET	<1%
7	id.scribd.com	INTERNET	<1%
8	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
9	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
10	journals.telkomuniversity.ac.id	INTERNET	<1%
11	journal.unpad.ac.id	INTERNET	<1%
12	anzdoc.com	INTERNET	<1%
13	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
14	elib.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
15	jurnal.fe.umi.ac.id	INTERNET	<1%
16	eprint.stieww.ac.id	INTERNET	<1%

<https://lib449.consortium1.turnitin.com/viewer/submissions/pid/25211/5077008/pmc?locale=en>

1/51

3/27/2021

Yulingsi Lukman, et al. - E11.17.108

17	www.scribd.com	INTERNET	<1%
18	e-repository.perpus.lainsalatiga.ac.id	INTERNET	<1%
19	www.ipem.org	INTERNET	<1%
20	id.123dok.com	INTERNET	<1%
21	es.scribd.com	INTERNET	<1%
22	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
23	www.sumbartoday.net	INTERNET	<1%
24	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
25	repository.upy.ac.id	INTERNET	<1%
26	media.neliti.com	INTERNET	<1%
27	news.palcomtech.com	INTERNET	<1%
28	garuda.ristekdikti.go.id	INTERNET	<1%
29	adoc.tips	INTERNET	<1%
30	journal.tarumanagara.ac.id	INTERNET	<1%
31	ejournal.undip.ac.id	INTERNET	<1%
32	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%
33	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
34	core.ac.uk	INTERNET	<1%
35	repository.untag-sby.ac.id	INTERNET	<1%
36	jurnal.umrah.ac.id	INTERNET	<1%
37	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
38	edoc.pub	INTERNET	<1%
39	Olvy Beatris Talangamin, Paulus . Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALD...	CROSSREF	<1%
40	ppid.magelangkab.go.id	INTERNET	<1%

3/27/2021	Yulingsi Lukman.docx - E11.17.108	
41	ejurnalunsam.id INTERNET	<1%
42	tropolis.info INTERNET	<1%
43	teknik.unpas.ac.id INTERNET	<1%
44	fe-akuntansi.unila.ac.id INTERNET	<1%
45	digilib.unpas.ac.id INTERNET	<1%
46	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
47	repository.widyatama.ac.id INTERNET	<1%
48	bogtaxconsulting.com INTERNET	<1%
49	publication.gunadarma.ac.id INTERNET	<1%
50	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
51	www.jadwalbimtekkepegawain.com INTERNET	<1%
52	docobook.com INTERNET	<1%
53	documents.mx INTERNET	<1%
54	junitakurniawati.blogspot.com INTERNET	<1%
55	mafiadoc.com INTERNET	<1%
56	idoc.pub INTERNET	<1%
57	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1%
58	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-07 SUBMITTED WORKS	<1%
59	eprints.perbanas.ac.id INTERNET	<1%
60	issuu.com INTERNET	<1%
61	peraturan.bpk.go.id INTERNET	<1%
Excluded search repositories:		
• None		
Excluded from Similarity Report:		
• Bibliography		
• Quotes		
• Small Matches (less than 15 words).		
https://iida09-consortium1.turnitin.com/viewers/submissions/view/25211-8577008/pent?locale=en		3/81

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Yulingsi Lukman
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 30 Maret 1997
4. NIM : E11.17.108
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Nipa Desa Pentadu Timur Kec.
Tilamuta, Kab. Boalemo
7. No. HP : 083819986300
8. Email : yulingsihlukman@gmail.com



B. Riwayat Hidup

1. SD : SDN 02 Tilamuta Pada Tahun 2010
2. SLTP Sederajat : MTs. Negeri 1 Tilamuta Pada Tahun 2013
3. SLTA : SMKN 1 Boalemo Pada Tahun 2016
4. Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas
Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi
2017-2021